



Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
2023

# LAPORAN KINERJA

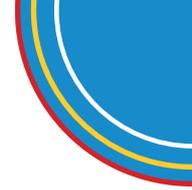
## DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2022



Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
2023

# LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI  
TAHUN 2022



# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dengan tepat waktu. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja ini mencakup pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktorat PAUD tahun 2022. Pada Perjanjian Kinerja tahun 2022, terdapat empat (4) sasaran kegiatan Direktorat PAUD yaitu 1) tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas; 2) meningkatnya capaian perkembangan PAUD yang berkualitas; 3) meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas; dan 4) meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Secara umum, Direktorat PAUD telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan sampai akhir tahun. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan Direktorat PAUD tahun 2022 sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja tahun 2023.

Akhir kata diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan kinerja Direktorat PAUD pada tahun 2022.

Jakarta, 30 Januari 2023

Pt. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini,



**Komalasari**



# DAFTAR ISI

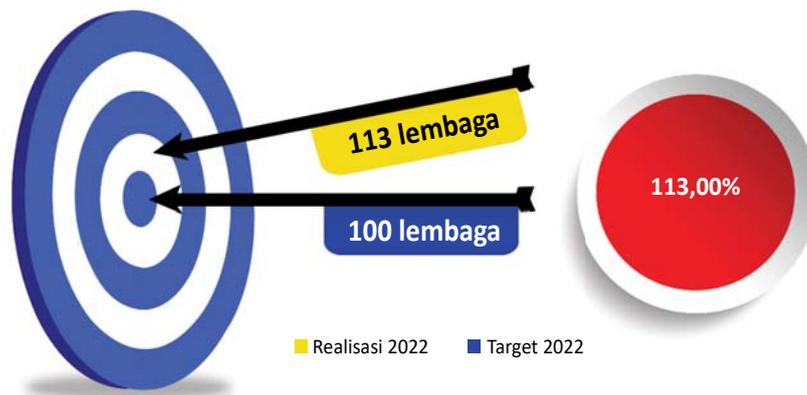
	Halaman Sampul .....	i
	Kata Pengantar .....	iii
	Daftar Isi .....	iv
	Ikhtisar Eksekutif .....	v
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	A. Gambaran Umum .....	1
	B. Dasar Hukum .....	2
	C. Tugas dan Fungsi .....	2
	D. Isu Strategis dan Peran Strategis .....	3
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>4</b>
	A. Visi .....	4
	B. Misi .....	4
	C. Rencana Kinerja Jangka Menengah .....	4
	D. Tujuan Strategis .....	5
	E. Program Prioritas .....	7
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>8</b>
	A. Capaian Kinerja.....	8
	B. Realisasi Anggaran.....	22
	C. Efisiensi Anggaran.....	23
	D. Penghargaan dan Program <i>Crosscutting/Collaborative</i> ..	23
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>29</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>31</b>
	Perjanjian Kinerja Awal.....	32
	Perjanjian Kinerja Revisi .....	35
	Pengukuran Kinerja .....	38
	Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu .....	48
	Surat Keputusan Tim Koordinasi	
	Pelaporan Kinerja Tahun 2022.....	49

# IKHTISAR EKSEKUTIF

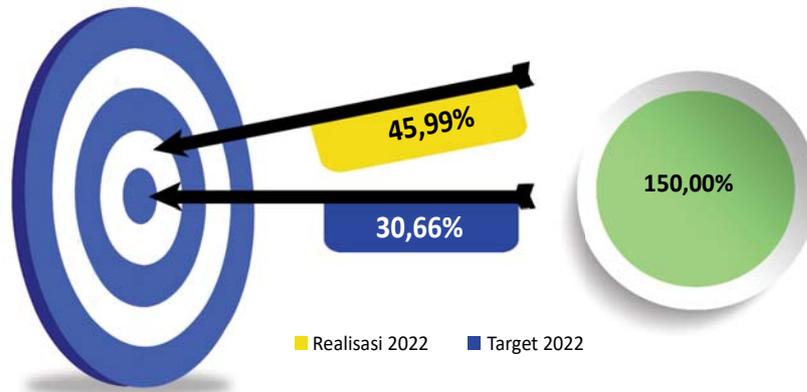
Laporan kinerja Direktorat PAUD Tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian empat (4) Sasaran Kegiatan (SK) dengan delapan (8) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022. Ketercapaian IKK akan lebih detail diuraikan pada BAB III.

Secara umum, berikut capaian IKK Direktorat PAUD tahun 2022.

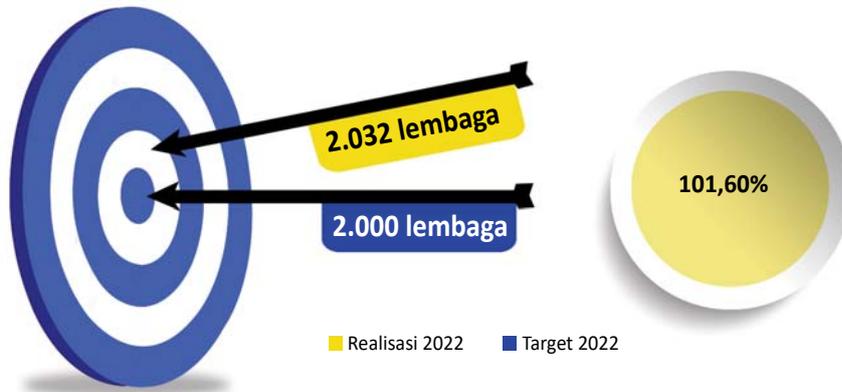
## 1. Jumlah Satuan PAUD Menerima Program Afirmasi



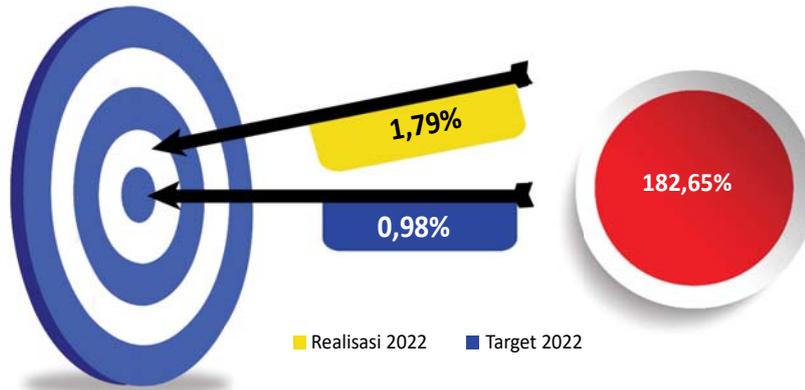
## 2. Persentase Satuan PAUD yang Menyelenggarakan Layanan Holistik Integratif



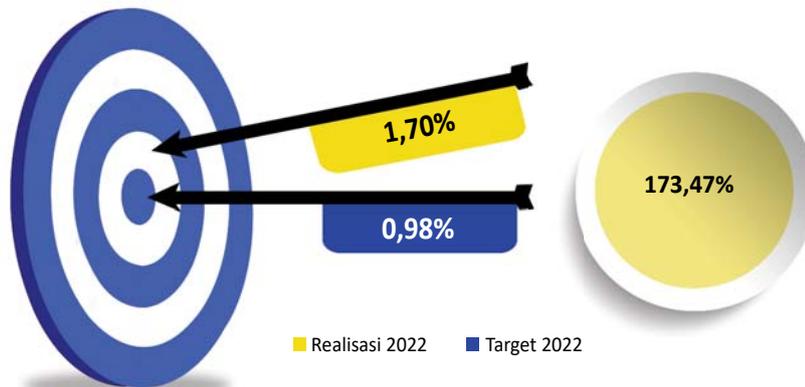
## 3. Jumlah PAUD Penggerak



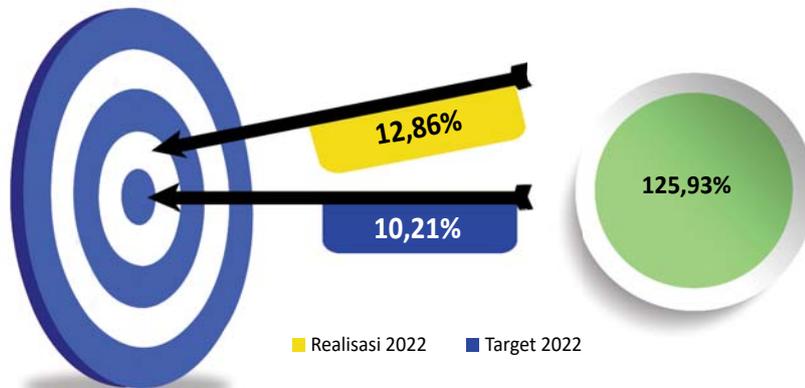
#### 4. Persentase Satuan PAUD yang Menerapkan Pembelajaran Paradigma Baru



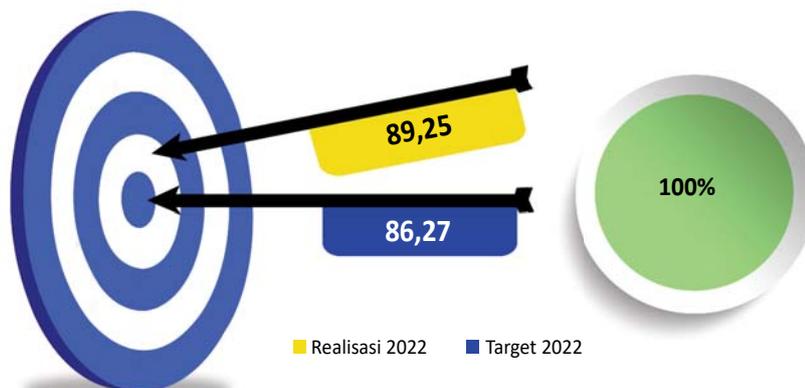
#### 5. Persentase Satuan PAUD yang Mendapatkan Pembinaan Peningkatan Mutu Pembelajaran



#### 6. Persentase Satuan PAUD yang Menggunakan Perangkat Pendidikan untuk Mendukung Proses Pembelajaran Berkualitas

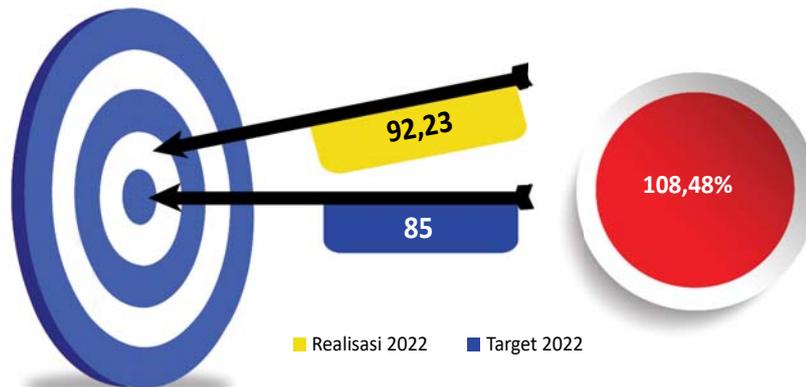


#### 7. Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini



**Catatan:** Rentang nilai untuk kategori A adalah >80 – 90

## 8. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pendidikan Anak Usia Dini



Sumber data: <https://spasikita.kemdikbud.go.id> tanggal 24 Januari 2022

Capaian Kinerja Keuangan  
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2022

99,69%

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Kompetensi dan kinerja sumber daya manusia di daerah dan di satuan PAUD masih belum optimal dalam mengimplementasikan kebijakan pusat.
2. Kepemilikan dan komitmen pemerintah daerah dalam mengadopsi kebijakan pusat belum optimal.
3. Turunan Peraturan pemerintah daerah terhadap kebijakan pusat berbeda-beda.
4. Pengawasan pemanfaatan bantuan pemerintah belum efektif.
5. Adanya himbauan bahwa program kementerian sebaiknya diberikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota bukan langsung ke satuan PAUD. Hal tersebut menyebabkan beberapa program kementerian yang harus dijalankan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota menjadi *overload* sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan program.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain:

1. Melakukan *video conference* melalui *zoom meeting* serta mengirim pekerjaan secara *online* dengan *scan file*.
2. Melakukan percepatan pemahaman program Direktorat PAUD bagi sumber daya manusia dinas pendidikan kabupaten/kota melalui webinar dan bimbingan teknis secara daring.
3. Menyediakan berbagai informasi tentang program dengan memanfaatkan sosial media (laman, facebook, instagram, youtube PAUDPEDIA) dan berbagai sumber informasi seperti video program, video animasi, dan siniar (*podcast*).
4. Memperkuat kerja sama dengan organisasi mitra PAUD untuk mempercepat pelaksanaan program apabila dinas pendidikan kabupaten/kota memerlukan bantuan untuk melaksanakan program/kegiatan yang difasilitasi oleh Direktorat PAUD.

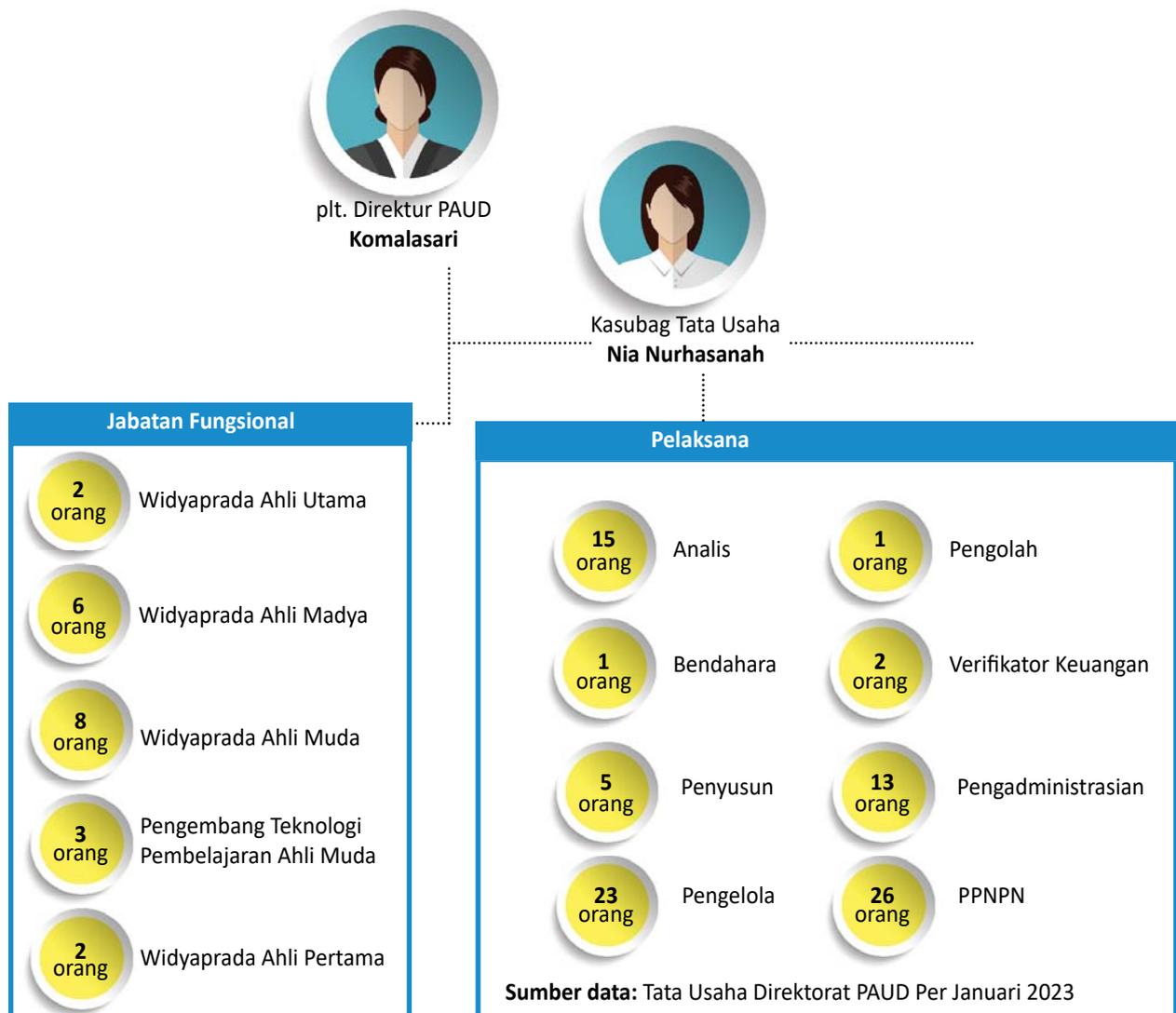




# PENDAHULUAN

## A. GAMBARAN UMUM

Direktorat PAUD merupakan satuan kerja pada Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Direktorat PAUD dibentuk pada tanggal 23 Agustus 2021 sesuai dengan penetapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sejak bulan Agustus 2022, Direktorat PAUD dipimpin oleh Komalasari sebagai Pelaksana Tugas Direktur dengan jumlah sumber daya manusia sebanyak 109 orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda.



## B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024;
6. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2022.

## C. TUGAS DAN FUNGSI

### **Tugas:**

Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021, Direktorat PAUD mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini.

### **Fungsi:**

Berikut fungsi Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
2. penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
3. pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;

4. pelaksanaan kebijakan di bidang standar peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
5. fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini;
7. penyiapan perumusan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau satuan pendidikan anak usia dini kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;
8. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini; dan
9. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

#### D. ISU STRATEGIS DAN PERAN STRATEGIS

Isu Strategis	Peran Strategis
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada komitmen dari kabupaten/kota berupa peraturan atau kebijakan terkait penyelenggaraan dan pengalokasian anggaran layanan PAUD HI</li> <li>• Miskonsepsi tentang program sekolah penggerak oleh para pemangku kepentingan di daerah</li> <li>• Miskonsepsi tentang transisi PAUD-SD antar anggota Forum Komunikasi PAUD-SD</li> <li>• Pelaksanaan penjaminan mutu di daerah harus diupayakan dari hasil Perencanaan Berbasis Data (PBD)</li> <li>• Belum semua satuan PAUD memiliki TIK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berperan penting dalam menyediakan layanan PAUD yang merata dan berkualitas</li> <li>• Berperan penting dalam meningkatkan capaian perkembangan PAUD yang berkualitas</li> <li>• Berperan penting dalam memberikan pendampingan penyelenggaraan PAUD HI</li> <li>• Berperan penting dalam meningkatkan pembelajaran PAUD yang berkualitas</li> <li>• Berperan penting dalam memberikan pendampingan kepada satuan PAUD penggerak</li> <li>• Berperan penting dalam memberikan pembinaan penerapan pembelajaran paradigma baru</li> <li>• Berperan penting dalam memberikan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran</li> </ul>



# PERENCANAAN KINERJA

## A. VISI

Sesuai Rencana Strategis Periode Tahun 2020 – 2024, Direktorat PAUD sebagai bagian dari Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah memiliki komitmen untuk menjalankan dan mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia pada RPJMN Tahun 2020 – 2024, yaitu:

**“Mewujudkan pendidikan anak usia dini yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.”**

## B. MISI

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Direktorat PAUD berkomitmen menjalankan Misi Presiden atau Nawacita kedua, yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia; Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Direktorat PAUD selaras dengan misi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua, yakni:

1. Mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan anak usia dini.

## C. RENCANA KINERJA JANGKA MENENGAH

Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022, berikut target indikator kinerja kegiatan jangka menengah yang ditetapkan Direktorat PAUD.



Kode	Uraian	Target Perjanjian Kinerja		
		2022	2023	2024
SK 1	Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas			
IKK 1.1	Jumlah satuan PAUD menerima program afirmasi	100	108	110
SK 2	Meningkatnya capaian perkembangan PAUD yang berkualitas			
IKK 2.1	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	30,66	33,12	35,56
SK 3	Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas			
IKK 3.1	Jumlah PAUD Penggerak	2.000	3.150	4.300
IKK 3.2	Persentase satuan PAUD yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	0,98	1,54	2,11
IKK 3.3	Persentase satuan PAUD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	0,98	1,54	2,11
IKK 3.4	Persentase satuan PAUD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	10,21	10,88	12,23
SK 4	Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini			
IKK 4.1	Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	A	A	A
IKK 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	85	85	85

#### D. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan besar Direktorat PAUD pada tahun 2020-2024 adalah: **“Melakukan transformasi non-reversibel pada Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia”**. Direktorat PAUD memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Tujuan besar ini diejawantahkan dalam empat tujuan, yaitu:

1. Meningkatnya persentase kab/kota dengan angka kesiapan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) 3-6 tahun diatas 75;
2. Meningkatnya persentase kab/kota yang menyediakan layanan PAUD HI;
3. Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang menjadi sekolah penggerak;
4. Meningkatnya persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran paradigma baru; dan
5. Meningkatnya persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran.

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Direktorat PAUD menetapkan target tahunan yang akan dicapai melalui Perjanjian Kinerja dengan ringkasan sebagai berikut.

## Perjanjian Kinerja Awal

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas	[IKK 1.1] Jumlah satuan PAUD menerima program afirmasi	100
2	[SK 2] Meningkatnya capaian perkembangan PAUD yang berkualitas	[IKK 2.1] Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	30,66
3	[SK 3] Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas	[IKK 3.1] Jumlah PAUD Penggerak	2.000
		[IKK 3.2] Persentase satuan PAUD yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	0,98
		[IKK 3.3] Persentase satuan PAUD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	0,98
		[IKK 3.4] Persentase satuan PAUD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	10,21
4	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	[IKK 4.1] Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	A
		[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	85

No.	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	4272	Pembinaan PAUD	Rp6.268.846.000
2.	4459	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Rp109.700.000.000
3.	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp19.612.454.000
<b>Total</b>			<b>Rp135.581.300.000</b>

Pagu anggaran awal Direktorat PAUD sebesar **Rp135.581.300.000**, - (seratus tiga puluh lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah). Tanggal 18 Februari 2022, terdapat penambahan anggaran BA-BUN sebesar **Rp23.441.650.000**, - (dua puluh tiga miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Tanggal 4 November 2022 (revisi ke-05 DIPA) terdapat pemotongan anggaran sebesar **Rp750.707.000**, - (tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah). Dana hibah program kerja sama RI dengan UNICEF, Direktorat PAUD mendapatkan anggaran sebesar **Rp1.162.697.000**, - (satu miliar seratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total akhir anggaran Direktorat PAUD menjadi **Rp153.686.640.000**, - (seratus lima puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

## Perjanjian Kinerja Revisi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas	[IKK 1.1] Jumlah satuan PAUD menerima program afirmasi	100
2	[SK 2] Meningkatnya capaian perkembangan PAUD yang berkualitas	[IKK 2.1] Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	30,66
3	[SK 3] Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas	[IKK 3.1] Jumlah PAUD Penggerak	2.000
		[IKK 3.2] Persentase satuan PAUD yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	0,98
		[IKK 3.3] Persentase satuan PAUD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	0,98
		[IKK 3.4] Persentase satuan PAUD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	10,21
4	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	[IKK 4.1] Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	A
		[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	85

No.	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	4272	Pembinaan PAUD	Rp29.378.396.000
2.	4459	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Rp104.781.150.000
3.	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp19.527.094.000
<b>Total</b>			<b>Rp153.686.640.000</b>

## E. PROGRAM PRIORITAS

Empat program prioritas yang dilaksanakan Direktorat PAUD selama tahun 2022 yaitu:

1. Program Sekolah Penggerak;
2. Implementasi Kurikulum Merdeka;
3. Perencanaan Berbasis Data; dan
4. Penyelenggaraan PAUD HI.



# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2022, Direktorat PAUD menetapkan 4 (empat) SK dengan 8 (delapan) IKK dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas	Jumlah satuan PAUD menerima program afirmasi	100	113	113,00%
Meningkatnya capaian perkembangan PAUD yang berkualitas	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	30,66	45,99	150,00%
Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas	Jumlah PAUD Penggerak	2.000	2.032	101,60%
	Persentase satuan PAUD yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	0,98	1,79	182,65%
	Persentase satuan PAUD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	0,98	1,70	173,47%
	Persentase satuan PAUD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	10,21	12,86	125,95%
Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	A (80,00%)	A (89,25%)	100,00%
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	85	92,23	108,51%

### [SK 1] Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas

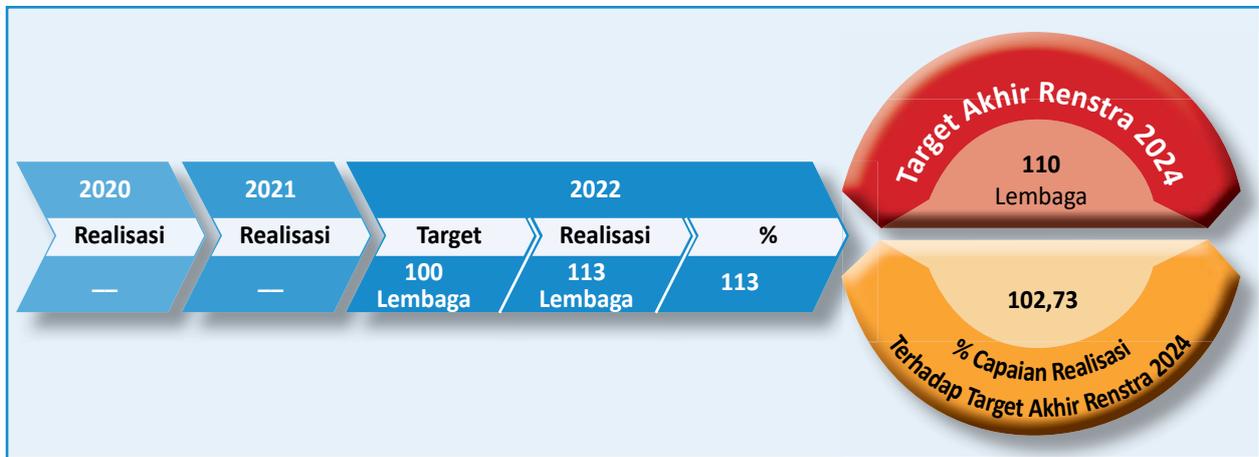
Ketercapaian sasaran kegiatan terkait tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas ditandai dengan penurunan jumlah desa yang belum memiliki layanan PAUD. Berdasar Dapodik, tahun 2021 sebanyak 24.072 desa yang belum memiliki PAUD, sedangkan tahun 2022 terjadi penurunan sebanyak 538 desa yang telah memiliki layanan PAUD, sehingga total desa yang belum memiliki layanan PAUD sebanyak 23.534 desa.

Sasaran kegiatan ini didukung oleh satu indikator, yaitu jumlah satuan PAUD menerima program afirmasi yang diharapkan dapat memperluas akses layanan PAUD dan kualitas layanan PAUD.

**[IKK 1.1] Jumlah Satuan PAUD Menerima Program Afirmasi**

Kebijakan afirmasi pendidikan merupakan momentum awal untuk tercapainya cita-cita akses pendidikan yang berkeadilan. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat konstitusi tidak akan pernah tercipta jika pendidikan hanya dinikmati oleh mereka di daerah yang dekat dengan pusat. Program afirmasi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah. Intervensi program afirmasi yang dilakukan mencakup afirmasi karena geografis (daerah khusus sesuai perundang-undangan yang berlaku) dan karena intervensi khusus (pencegahan anak rentan putus sekolah, peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan yang tidak mampu dari segi ekonomi).

Pencapaian IKK ini dihitung dari jumlah satuan PAUD yang menerima program afirmasi.



IKK ini merupakan salah satu IKK baru yang terdapat dalam penyempurnaan Renstra Kemendikbudristek, di mana IKK sebelumnya yang terkait dengan pemerataan akses layanan PAUD adalah **Jumlah Kab/Kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,1%**.

Capaian IKK jumlah satuan PAUD menerima program afirmasi mencapai 113% dan perbandingan dengan target akhir Renstra (2024) mencapai 102,73%. Hal ini terjadi karena tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran dan penambahan output dari program lainnya sehingga target yang semula hanya 100 lembaga terealisasi 113 lembaga. Target IKK ini bukan merupakan akumulasi tetapi target per tahun yang ditetapkan untuk pendampingan jumlah satuan PAUD dalam pelaksanaan program afirmasi.

Ketercapaian IKK jumlah satuan PAUD menerima program afirmasi, didukung program/kegiatan satuan PAUD mendapatkan pembinaan afirmasi melalui pemberian bantuan PAUD layanan khusus dan Bantuan Pasca Bencana.

Bantuan PAUD layanan khusus sebesar Rp30.000.000,- diberikan untuk pembentukan 100 satuan PAUD di desa yang belum memiliki PAUD dan berada di daerah khusus berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 160/P Tahun 2021 Tentang Daerah Khusus berdasarkan Kondisi Geografis.

Bantuan pasca bencana bertujuan untuk mendukung ketersediaan akses layanan PAUD, mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, dan mengoptimalkan kembali pembelajaran dan layanan pemenuhan kebutuhan esensial di satuan PAUD yang terdampak bencana. Bantuan pasca bencana disalurkan kepada 13 satuan PAUD dengan target awal adalah 10 satuan PAUD dan total anggaran bantuan yang disalurkan sebesar Rp1.000.000.000,-

Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan ini adalah:

1. Satuan PAUD yang terdata di daerah afirmasi masih banyak yang sulit dijangkau karena akses dan kondisi geografis daerah tersebut.
2. Daerah afirmasi memiliki perbedaan peraturan dalam hal perizinan maupun kebijakan pelaksanaan program layanan PAUD, misalnya dalam pemanfaatan dana desa dalam penyelenggaraan layanan PAUD.
3. Salah satu program afirmasi adalah memfasilitasi dalam hal revitalisasi dan pendampingan satuan PAUD yang terdampak bencana. Namun, wilayah yang terdampak bencana sangat luas dan jumlah satuan PAUD yang membutuhkan fasilitasi tersebut sangat banyak, tetapi paket fasilitasi yang tersedia masih dalam jumlah sedikit.

Strategi tindak lanjut yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan yang ada adalah:

1. Melakukan pendataan yang lebih baik untuk satuan PAUD di daerah afirmasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat melibatkan aparatur desa, dinas pendidikan, serta organisasi mitra PAUD.
2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Desa PDTT, Kemendagri, dan dinas pendidikan dalam upaya menyelaraskan peraturan serta kebijakan terkait perizinan dan pelaksanaan program layanan PAUD dengan memanfaatkan dana desa.
3. Melakukan sosialisasi Program Satuan Pendidikan Aman Bencana untuk mempersiapkan satuan PAUD dalam mitigasi dan penanganan bencana alam.
4. Bekerja sama dengan pihak swasta memanfaatkan dana CSR untuk memfasilitasi satuan PAUD yang terdampak bencana tetapi belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

## **[SK 2] Meningkatnya Capaian Perkembangan PAUD yang Berkualitas**

Ketercapaian sasaran kegiatan terkait meningkatnya capaian perkembangan PAUD yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya jumlah satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif. Tahun 2021 sebanyak 56.193 satuan PAUD menyelenggarakan layanan holistik, sedangkan pada tahun 2022 bertambah menjadi 94.541 satuan PAUD atau meningkat 68,24%.

Sasaran kegiatan ini didukung oleh satu indikator, yaitu persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif yang salah satu layanannya adalah pemenuhan kebutuhan esensial anak dengan harapan dapat meningkatkan capaian perkembangan anak di luar bidang pendidikan.

### **[IKK 2.1] Persentase Satuan PAUD yang Menyelenggarakan Layanan Holistik Integratif**

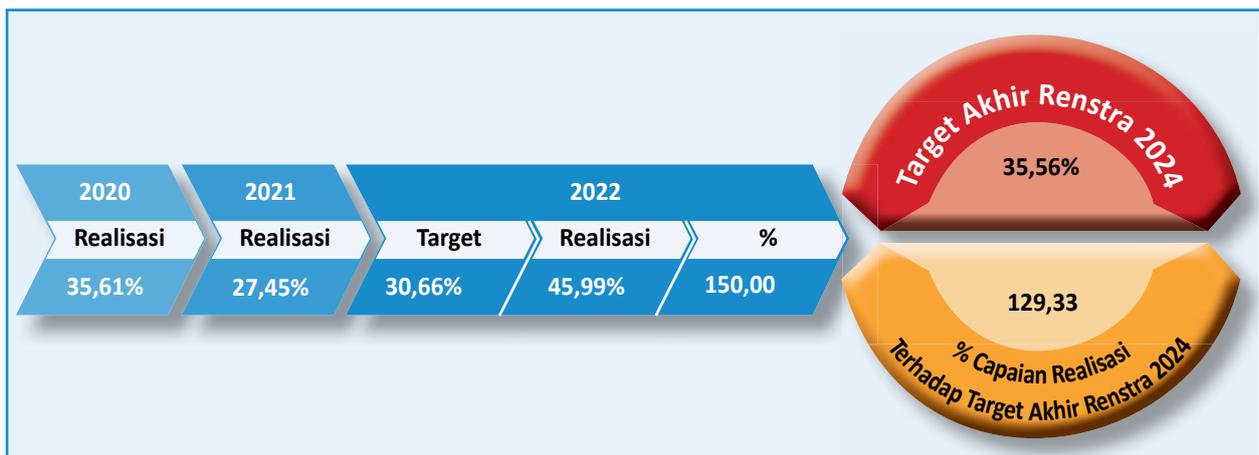
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD Holistik Integratif, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhi Holistik Integratifnya hak tumbuh kembang

anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak.

Tujuan PAUD Holistik Integratif, secara umum adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; sedangkan secara khusus adalah: (1) terpenuhi Holistik Integratifnya kebutuhan esensial anak usia dini secara; (2) terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada; (3) terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan (4) terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan PAUD HOLISTIK INTEGRATIF dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal demi mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif.

Pencapaian IKK ini dihitung dari jumlah satuan PAUD yang telah memenuhi minimal 7 indikator PAUD HI di Dapodik dibagi dengan seluruh jumlah satuan PAUD dikalikan 100%.



Ketercapaian IKK ini berdasarkan informasi dari Dapodik yang merupakan persentase jumlah satuan PAUD yang telah memberikan layanan secara holistik integratif dengan memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini di luar bidang pendidikan yang dapat disediakan oleh satuan PAUD. Indikator layanan kebutuhan esensial tersebut adalah:

1. Menyelenggarakan kelas orang tua (kelompok pertemuan orang tua);
2. Memantau pertumbuhan anak (jadwal pemeriksaan kesehatan dasar seperti: pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala);
3. Memantau perkembangan anak (jadwal pemeriksaan deteksi dini tumbuh kembang (DDTK));
4. Melakukan koordinasi dengan unit terkait pemenuhan gizi dan kesehatan peserta didik (Misalnya, adanya sistem rujukan DDTK ke Puskesmas terdekat);
5. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), seperti kegiatan cuci tangan;
6. Memberikan pemberian makanan tambahan/makanan dengan gizi sehat (PMT);

7. Memantau kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK) peserta didik (dianggap memenuhi jika jumlah peserta didik yang memiliki NIK lebih dari atau sama dengan 50% dari jumlah keseluruhan peserta didik di satuan PAUD); dan
8. Memenuhi ketersediaan fasilitas sanitasi (dianggap memenuhi jika satuan PAUD memiliki 2 dari 3 fasilitas sanitasi, yaitu instalasi air, jamban/toilet dengan air bersih, dan/atau instalasi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir).

Jumlah satuan PAUD yang memenuhi minimal 7 indikator di atas ada 94.541 satuan PAUD sehingga capaian IKK ini sebesar 45,99% atau 150,00% dari target capaian 2022. Sedangkan terhadap perbandingan target akhir Renstra sudah mencapai 129,33%. Hal ini dikarenakan banyak satuan PAUD yang sudah mulai melakukan pemutakhiran data pada Dapodik sehingga semakin banyak satuan PAUD yang terdata melaksanakan layanan PAUD secara holistik integratif.

Program/kegiatan yang mendukung untuk pencapaian IKK ini, yaitu:

1. Satuan PAUD menyelenggarakan pendekatan holistik integratif melalui bantuan PAUD-HI sebesar Rp150.000.000,- ke 50 kabupaten/kota dengan tujuan untuk:
  - a. Mendorong kabupaten/kota memenuhi regulasi dan kebijakan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan PAUD-HI;
  - b. Melakukan sosialisasi dan advokasi kebijakan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan PAUD-HI dalam rangka percepatan penurunan stunting;
  - c. Membentuk tim fasilitator untuk melakukan pendampingan ke 100 satuan PAUD di setiap kabupaten/kota dalam penyelenggaraan PAUD-HI; dan
  - d. Memfasilitasi kabupaten/kota untuk melaksanakan penguatan kapasitas dan pendampingan ke satuan PAUD.
2. Satuan PAUD yang melaksanakan program UKS melalui program/kegiatan pemberian bantuan UKS PAUD sebesar Rp12.000.000,- ke 500 satuan PAUD dengan tujuan untuk mendorong satuan PAUD meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan program UKS melalui pelaksanaan Kelas Orang Tua, yang salah satu tujuannya adalah membudayakan PHBS di keluarga dalam rangka pencegahan dan penanganan *stunting*.

Hambatan/Kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUD HI harus didukung oleh penetapan regulasi dalam bentuk peraturan bupati atau wali kota agar dapat melakukan pengalokasian anggaran yang dapat mendukung pelaksanaan PAUD HI di masing-masing daerah.
2. Masih banyak satuan PAUD yang telah melaksanakan layanan holistik integratif tetapi belum melakukan pembaruan pengisian pemenuhan 8 indikator PAUD HI di Dapodik sehingga tidak terdata sebagai satuan PAUD yang menyelenggarakan holistik integratif.

Strategi/tindak lanjut yang dilakukan dalam pencapaian yang cukup signifikan ini adalah:

1. Sosialisasi layanan PAUD HI melalui webinar dan video tutorial pengisian layanan PAUD HI di Dapodik; dan
2. Meningkatkan Komitmen Dinas Pendidikan Kab/Kota, Bappeda, dalam menindaklanjuti program PAUD HI di tahun yang akan datang.

### [SK 3] Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas

Ketercapaian sasaran kegiatan terkait meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya jumlah satuan PAUD yang telah terakreditasi. Tahun 2021, jumlah layanan PAUD yang terakreditasi sebanyak 111.316 satuan. Tahun 2022, sebanyak 35.833 layanan PAUD telah diakreditasi sehingga total layanan PAUD yang telah terakreditasi sampai akhir tahun 2022 sebanyak 147.149 satuan.

Selain itu, berdasarkan data akses PMM, satuan PAUD yang mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri sebanyak 23.977 satuan dengan rincian: 1) mandiri belajar sebanyak 9.555 satuan; 2) mandiri berubah sebanyak 13.273 satuan; dan 3) mandiri berbagi sebanyak 1.149 satuan.

Sasaran kegiatan ini didukung oleh empat indikator, yaitu jumlah PAUD penggerak, persentase satuan PAUD yang menerapkan pembelajaran paradigma baru, persentase satuan PAUD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran, dan persentase satuan PAUD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas.

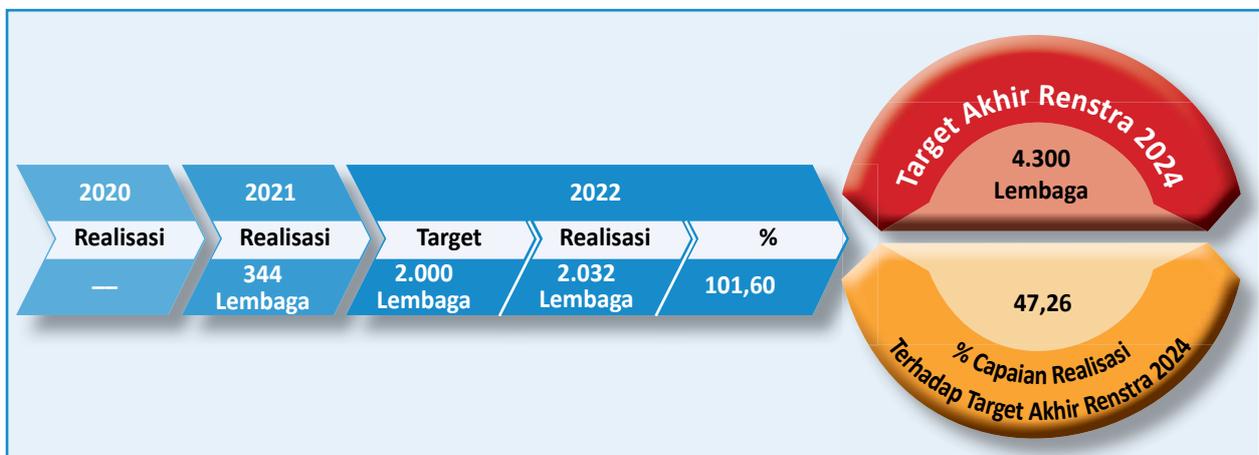
#### [IKK 3.1] Jumlah PAUD Penggerak

Satuan PAUD Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Visi Pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis; kreatif; mandiri; beriman bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia; bergotong royong dan berkebinekaan global.

Program Sekolah Penggerak antara lain:

1. Pendampingan konsultatif dan asimetris.
2. Penguatan SDM di sekolah.
3. Pembelajaran dengan paradigma baru.
4. Perencanaan berbasis data.
5. Digitalisasi sekolah.

Penetapan sekolah penggerak berdasarkan keputusan Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, setelah mengikuti serangkaian seleksi yang dikoordinasikan bersama dengan Ditjen GTK.



Sekolah penggerak pada PAUD adalah satuan PAUD sebagai pelaksana program sekolah penggerak yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil pelajar Pancasila. Penetapan satuan PAUD sebagai sekolah penggerak berdasarkan kriteria kepala sekolah yang lulus dari seleksi.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 6586/C/HK.00/2021 jumlah satuan PAUD penggerak Angkatan I sebanyak 344 satuan. Jumlah satuan PAUD penggerak Angkatan II sebanyak 1.688 satuan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.00/2022. Sejumlah 2.032 satuan PAUD penggerak yang merupakan angkatan I dan II telah dilakukan pendampingan secara intensif oleh Direktorat PAUD.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 7883/C/HK.03.01/2022 sebanyak 1.614 satuan PAUD telah ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak angkatan III dan akan dilakukan pendampingan pada tahun 2023. Total satuan PAUD penggerak sampai dengan saat ini sebanyak 3.646 satuan PAUD.

Capaian IKK jumlah PAUD penggerak mencapai 101,60% dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra mencapai 47,26%. Program/kegiatan yang mendukung ketercapaian IKK ini adalah satuan PAUD penggerak yang mendapatkan pendampingan berupa kegiatan bimbingan teknis program sekolah penggerak (PSP), sosialisasi dan koordinasi PSP, pendampingan sekolah penggerak, pendampingan transformasi sekolah penggerak, dan bantuan PSP Angkatan II yang belum menerima BOP Kinerja.

Kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Miskonsepsi tentang program sekolah penggerak oleh para pemangku kepentingan di daerah, seperti pergantian kepala sekolah tidak sesuai dengan mekanisme, program sekolah penggerak dianggap seperti sekolah model/percontohan sebelumnya, dan lain sebagainya.
2. Rendahnya *sense of ownership* pemerintah daerah terhadap program sekolah penggerak, sehingga tidak mengalokasikan anggaran daerah untuk pelaksanaan program sekolah penggerak.
3. *Silo effect* di pemerintah daerah khususnya bidang guru dan tenaga kependidikan (GTK) dan bidang PAUD sebagai yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program sekolah penggerak di daerah.
4. Belum semua satuan PAUD penggerak angkatan I dan II mengakses ke Platform Merdeka Mengajar (PMM).
5. Jadwal pelaksanaan pelatihan Komite Pembelajaran (PKP) yang mengganggu proses pembelajaran di satuan PAUD karena dilaksanakan bersamaan dengan kalender akademik.
6. Proses *hand over* satuan PAUD penggerak angkatan I ke pemerintah daerah yang diharapkan akan melanjutkan keberlangsungan program sekolah penggerak, seperti menyediakan fasilitator sekolah penggerak, melanjutkan PKP, dan lain sebagainya.

Strategi/tindak lanjut yang dilakukan adalah:

1. Mendorong UPT Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk mengadvokasi dinas pendidikan kabupaten/kota:

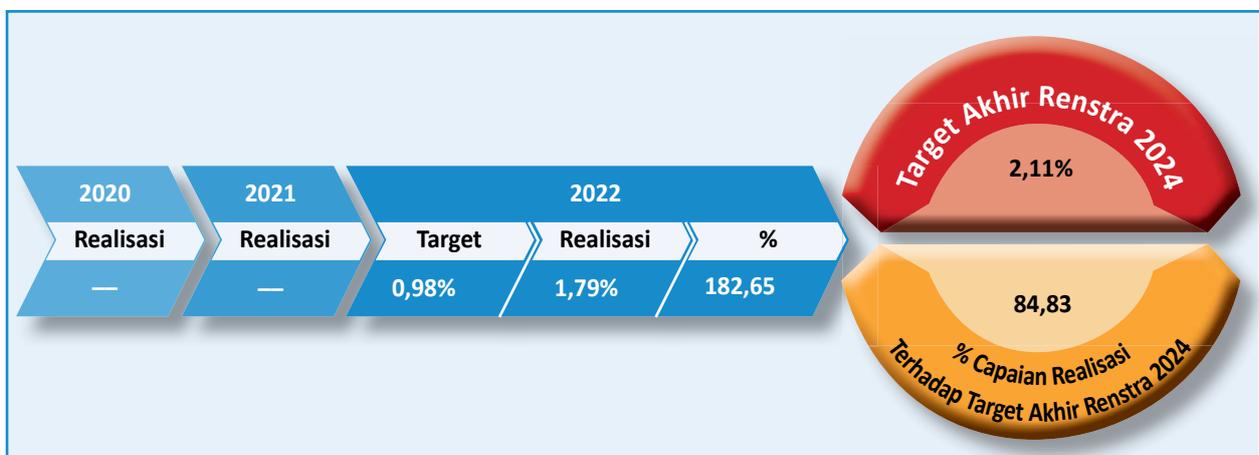
- a. dalam meluruskan miskonsepsi yang masih ada;
  - b. untuk mengingatkan bahwa program sekolah penggerak merupakan program kolaborasi pusat dan daerah; dan
  - c. agar perubahan pejabat daerah tidak memengaruhi implementasi program.
2. Mendorong UPT Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan dinas pendidikan kabupaten/kota untuk:
    - a. menumbuhkan kolaborasi lintas bidang; dan
    - b. melakukan deteksi dini terkait dengan pergantian kepala satuan PAUD penggerak agar sesuai dengan mekanisme yang berlaku
  3. Melakukan pendampingan khusus kepada satuan PAUD penggerak angkatan I dan II yang belum akses ke PMM.
  4. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal GTK agar menyinkronkan jadwal pelaksanaan PKP dengan kalender akademik
  5. Menyiapkan strategi *hand over* untuk satuan PAUD penggerak angkatan I kepada pemerintah daerah.

### [IKK 3.2] Persentase Satuan PAUD yang Menerapkan Pembelajaran Paradigma Baru

Jumlah satuan PAUD penggerak yang menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Kurikulum paradigma baru tersebut akan mulai digunakan di Sekolah Penggerak, yang selanjutnya akan terus bertambah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan lainnya. Sekolah yang baru menerapkan kurikulum paradigma baru perlu mendapatkan pendampingan dalam implementasinya, agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan hasil yang diharapkan.

Pencapaian IKK ini dihitung dari jumlah satuan PAUD penggerak dibagi dengan jumlah satuan PAUD keseluruhan dikalikan 100%. Total satuan PAUD penggerak angkatan I, II, dan III sebanyak 3.646 satuan.

Capaian IKK persentase satuan PAUD yang menerapkan pembelajaran paradigma baru mencapai 182,65% sehingga capaian ini jika dibandingkan dengan target akhir Renstra mencapai 84,83%.



IKK ini merupakan IKK baru yang terdapat dalam penyempurnaan Renstra Kemendikbudristek di mana melihat satuan PAUD yang telah menerapkan pembelajaran paradigma baru dalam hal ini adalah kurikulum merdeka. Penerapan kurikulum merdeka belum merupakan suatu kewajiban namun sebuah pilihan yang dapat disesuaikan dengan kondisi kesiapan satuan PAUD. Pada awalnya, kurikulum merdeka hanya diterapkan oleh satuan PAUD penggerak, seiring berjalannya waktu banyak satuan PAUD lainnya yang mendaftarkan diri Mandiri Belajar untuk menerapkan kurikulum merdeka.

Program/kegiatan yang mendukung ketercapaian IKK ini adalah satuan PAUD yang menerapkan kurikulum dan model pembelajaran yang berlaku melalui:

1. Bantuan lingkungan belajar berkualitas (LBB) sebesar Rp35.000.000,- ke 200 dinas pendidikan kabupaten/kota untuk melaksanakan bimbingan teknis LBB melalui perencanaan berbasis data (PBD) bagi pusat kegiatan gugus (PKG) PAUD. Bantuan ini bertujuan untuk mendorong dinas pendidikan kabupaten/kota dan PKG melaksanakan dan mendampingi satuan PAUD melakukan perencanaan berbasis data dalam mewujudkan lingkungan belajar berkualitas.
2. Bantuan program kesiapan bersekolah sebesar Rp75.000.000,- ke 50 dinas pendidikan kabupaten/kota dengan tujuan untuk: 1) membentuk forum komunikasi PAUD-SD; 2) memfasilitasi forum komunikasi PAUD-SD membuat strategi kesiapan anak bersekolah; dan 3) melaksanakan sosialisasi pada 50 Kepala Sekolah dan Guru jenjang PAUD dan SD kelas rendah.

Kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah

1. Miskonsepsi tentang transisi PAUD-SD antar anggota Forum Komunikasi PAUD-SD
2. Masih banyak guru PAUD dan SD kelas rendah yang belum mengikuti sosialisasi program transisi PAUD-SD.

Strategi/tindak lanjut yang dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Kesiapan Bersekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, anggota Forum Komunikasi PAUD-SD, Penilik dan Pengawas, PKG PAUD, KKG SD, Guru PAUD dan SD, serta orang tua PAUD dan SD

### **[IKK3.3] Persentase Satuan PAUD yang Mendapatkan Pembinaan Peningkatan Mutu Pembelajaran**

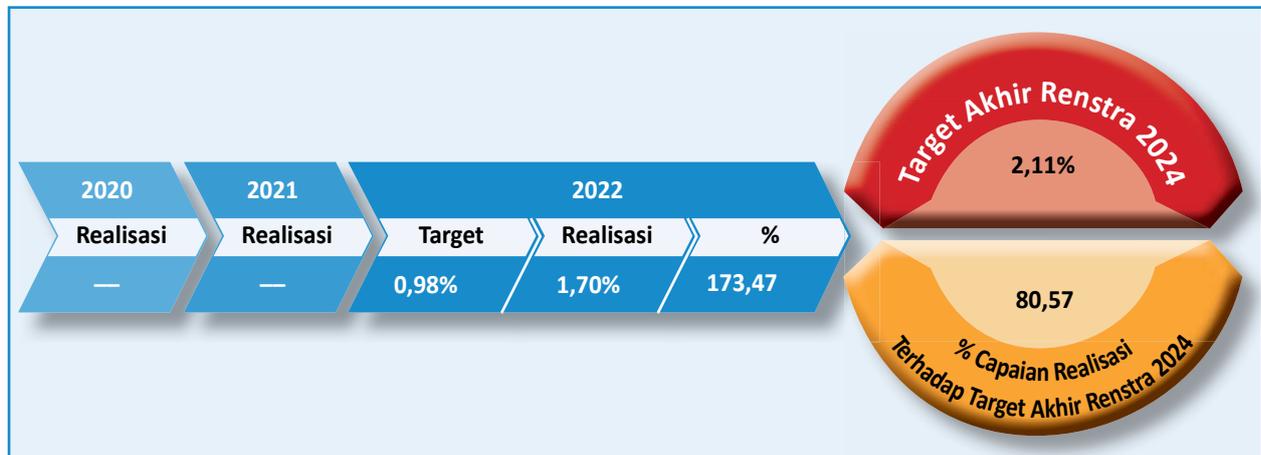
Satuan PAUD yang didampingi dalam meningkatkan mutu pembelajaran untuk peningkatan mutu pendidikan daerah melalui profil dan rapor mutu pendidikan daerah. Pendampingan dilakukan melalui program kegiatan direktorat dan juga dengan pemberian bantuan kepada kab/kota untuk meningkatkan mutu pembelajaran satuan PAUD di wilayahnya.

Tujuan dari pendampingan mutu yaitu:

1. meningkatkan capaian perkembangan anak;
2. meningkatkan pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini;
3. meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Satuan Pendidikan anak usia dini;
4. meningkatkan kualitas pengelolaan Satuan Pendidikan anak usia dini; dan
5. meningkatkan jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pencapaian IKK ini dihitung dari jumlah satuan PAUD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran dibagi dengan jumlah satuan PAUD keseluruhan dikalikan 100%.

Capaian IKK persentase satuan PAUD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran mencapai 173,47% dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra mencapai 80,57%. Capaian 173,47% dikarenakan pada tahun 2022 terdapat 139 kabupaten/kota yang didampingi dalam pelaksanaan penjaminan mutu satuan PAUD dan masing-masing kabupaten/kota tersebut harus mendampingi minimal 25 satuan PAUD yang belum terakreditasi dan siap diakreditasi.



IKK ini merupakan IKK baru yang terdapat dalam penyempurnaan Renstra Kemendikbudristek. Ketercapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh program/kegiatan berikut ini.

1. Lembaga/mitra PAUD memperoleh pembinaan peningkatan kapasitas melalui bantuan Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD sebesar Rp50.000.000,- ke 50 kabupaten/kota untuk:
  - a. melakukan advokasi ke berbagai pemangku kepentingan di daerah;
  - b. meningkatkan kapasitas Bunda PAUD Kecamatan/Desa/Kelurahan; dan
  - c. menguatkan dukungan bagi satuan PAUD agar dapat menyediakan layanan yang sesuai dengan indikator kinerja layanan PAUD berkualitas.
2. Satuan PAUD yang menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran yang berlaku melalui bantuan literasi dasar sebesar Rp15.000.000,- ke 500 satuan PAUD di kabupaten/kota sesuai dengan lokus sasaran program literasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Tujuan bantuan literasi dasar adalah untuk membentuk layanan pojok baca di satuan PAUD dan menguatkan keterampilan orang tua dalam memanfaatkan buku bacaan anak untuk menguatkan literasi anak usia dini dalam membangun kemampuan bahasa dan karakter.
3. Satuan PAUD menyelenggarakan pendekatan holistik integratif melalui bantuan operasional penyelenggaraan PAUD untuk anak berkebutuhan khusus (BOP PAUD ABK) sebesar Rp2.000.000,- ke 2.000 anak dengan tujuan untuk:
  - a. memperluas dan meningkatkan layanan PAUD bagi ABK;
  - b. meningkatkan layanan dan mutu pembelajaran bagi ABK di satuan PAUD inklusif dan meningkatkan angka partisipasi anak berkebutuhan khusus usia 4 – 6 tahun; dan
  - c. membantu pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan bagi ABK untuk keberlangsungan layanan PAUD inklusif.

4. Satuan PAUD penggerak yang mendapatkan pendampingan melalui pemberian bantuan pendampingan mutu dalam bentuk uang sebesar Rp35.000.000,- ke 139 kabupaten/kota yang memiliki 25 satuan PAUD yang belum terakreditasi dan siap diakreditasi. Bantuan pendampingan mutu bertujuan untuk mendorong dinas pendidikan kabupaten/kota untuk melakukan peningkatan mutu satuan PAUD sehingga mutu satuan PAUD terpenuhi minimal terakreditasi B.

Kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini:

1. Penjaminan mutu yang merupakan fungsi dari Direktorat PAUD, dalam pelaksanaan di daerah sering juga dibantu oleh mitra PAUD, seperti Bunda PAUD, yang diharapkan dapat menjadi tokoh yang mendorong pemerintah daerah agar dapat meningkatkan mutu layanan PAUD di daerah. Namun, masih terdapat beberapa Bunda PAUD yang belum memahami pelaksanaan PAUD berkualitas sehingga peningkatan mutu di daerah belum terlaksana sesuai harapan.
2. Pelaksanaan penjaminan mutu di daerah yang belum tuntas dikarenakan sering terjadi pergantian pejabat.

Strategi/tindak lanjut yang dilakukan:

1. Melakukan pendampingan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD dalam melakukan pendampingan ke daerah sebagai upaya mendorong peningkatan penjaminan mutu layanan PAUD di daerah.
2. Sosialisasi dan pendampingan ke dinas pendidikan kabupaten/kota mengenai seluruh program Kemendikbudristek yang mendukung peningkatan penjaminan mutu layanan PAUD di daerah, seperti program perencanaan berbasis data, implementasi kurikulum merdeka, program sekolah penggerak, dan penyelenggaraan PAUD HI.

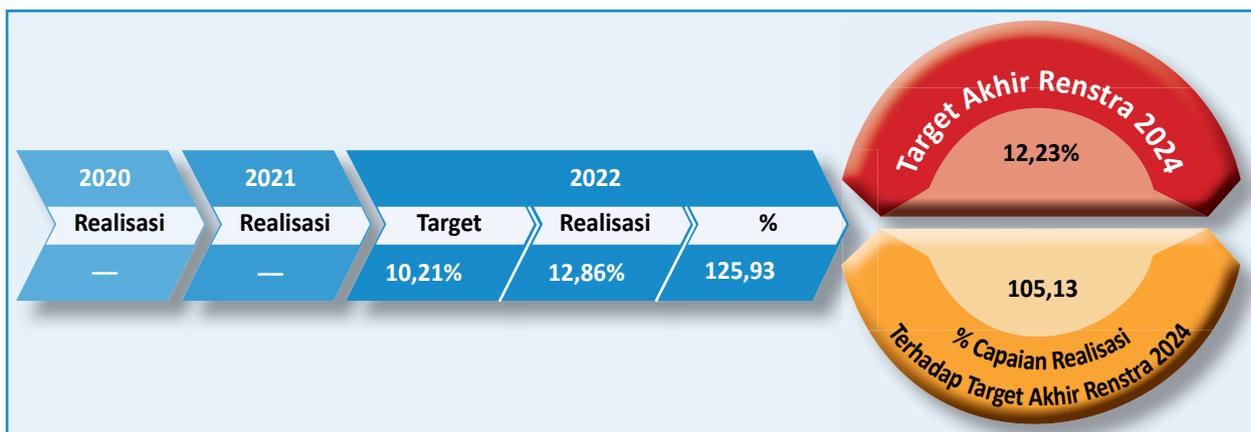
#### **[IKK 3.4] Persentase satuan PAUD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas**

Satuan PAUD yang memiliki perangkat pendidikan yang berkualitas dengan indikator:

1. Memiliki minimal satu judul buku bacaan PAUD.
2. Memiliki minimal satu komputer/Laptop.
3. Memiliki minimal satu APE bahan alam.
4. Memiliki minimal satu tambahan APE lainnya yang terdata dalam Dapodik.

Pencapaian IKK ini dihitung dari jumlah satuan PAUD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas dibagi jumlah seluruh satuan PAUD dikali 100%.

Capaian IKK persentase satuan PAUD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas mencapai 125,93% dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra mencapai 105,13%. Hal ini dikarenakan semakin banyak satuan PAUD yang memiliki perangkat pendidikan, salah satunya TIK. Peningkatan jumlah satuan PAUD yang memiliki perangkat TIK disebabkan oleh pemanfaatan dana BOP yang dapat digunakan untuk membeli perangkat TIK.



IKK ini merupakan IKK baru yang terdapat dalam penyempurnaan Renstra Kemendikbudristek.

Pencapaian IKK tersebut didukung oleh program/kegiatan satuan PAUD memperoleh bantuan sarana pembelajaran termasuk alat permainan edukatif (APE) melalui pemberian bantuan TIK PAUD kepada 1.297 satuan PAUD penggerak angkatan II.

Perhitungan capaian IKK ini dengan melihat jumlah satuan PAUD yang memiliki komputer sebanyak 24.940 satuan ditambah dengan jumlah satuan PAUD penerima bantuan TIK sehingga total satuan PAUD yang diasumsikan memiliki perangkat pendidikan sebanyak 26.237 satuan.

Kendala/ permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini:

1. Keterbatasan jumlah paket bantuan yang diperuntukkan satuan PAUD.
2. Masih banyak satuan PAUD yang belum memiliki TIK.
3. Belum semua satuan PAUD dapat memanfaatkan TIK atau komputer untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di satuan PAUD.

Strategi/tindak lanjut yang dilakukan adalah:

1. Berkoordinasi dan mengusulkan alokasi anggaran melalui DAK Fisik untuk pemenuhan TIK di satuan PAUD dengan memberikan hasil evaluasi mengenai pemanfaatan TIK di satuan PAUD.
2. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan dan pemanfaatan TIK

#### [SK 4] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran kegiatan ini didukung oleh dua indikator, yaitu predikat SAKIP dan nilai kinerja anggaran (NKA) atas pelaksanaan RKA-KL Direktorat PAUD.

##### [IKK 4.1] Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

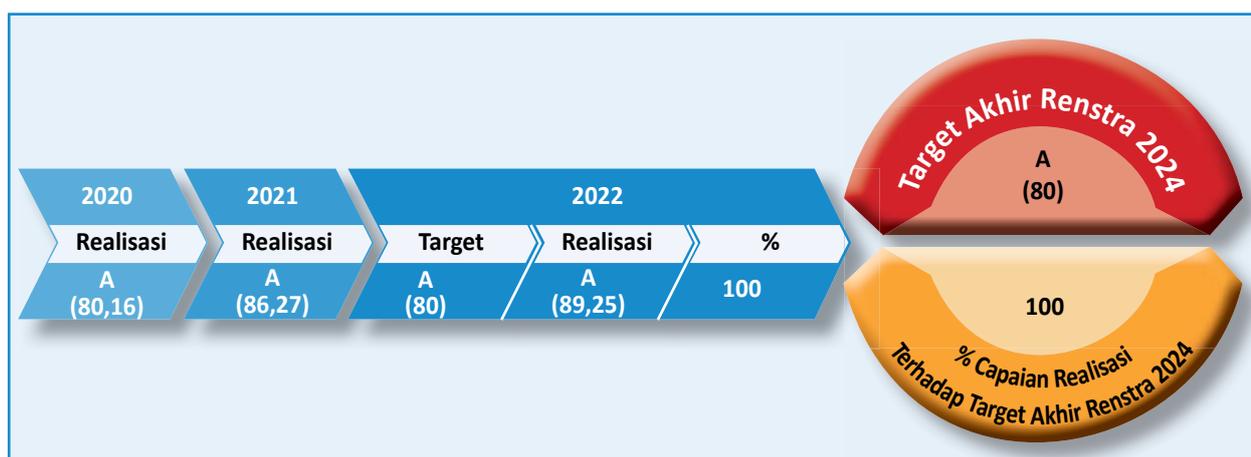
Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dengan berpedoman pada

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Pencapaian IKK ini merupakan perolehan nilai SAKIP yang merupakan jumlah dari nilai perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang



Ketercapaian IKK tersebut dikarenakan pada tahun 2022, Direktorat PAUD mendapatkan predikat SAKIP dengan nilai 89,25% (kategori A).

Strategi/tindak lanjut yang dilakukan adalah tetap berupaya meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga kinerja yang dihasilkan dapat mencapai hasil maksimal berupa SAKIP dengan kategori AA.

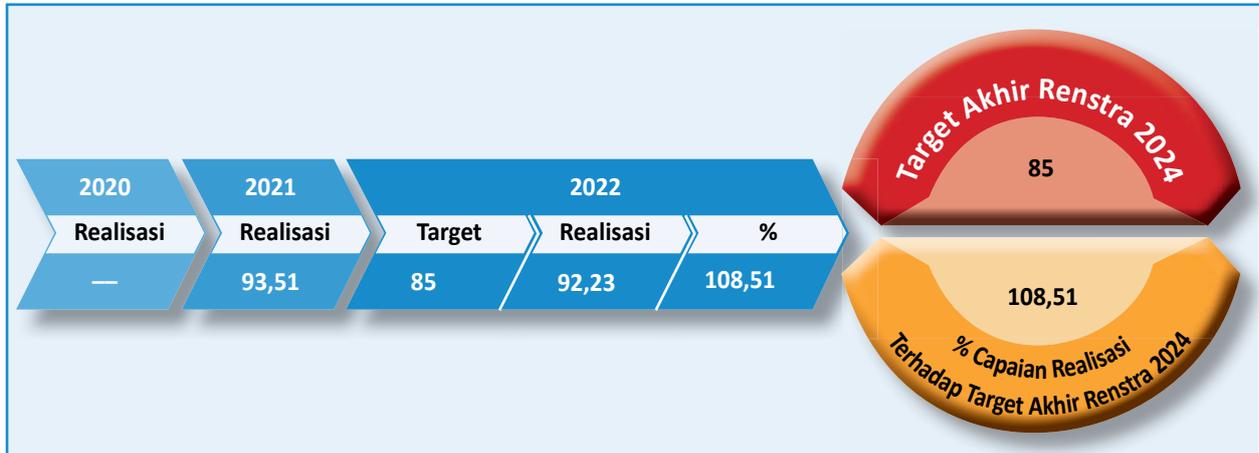
#### [IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

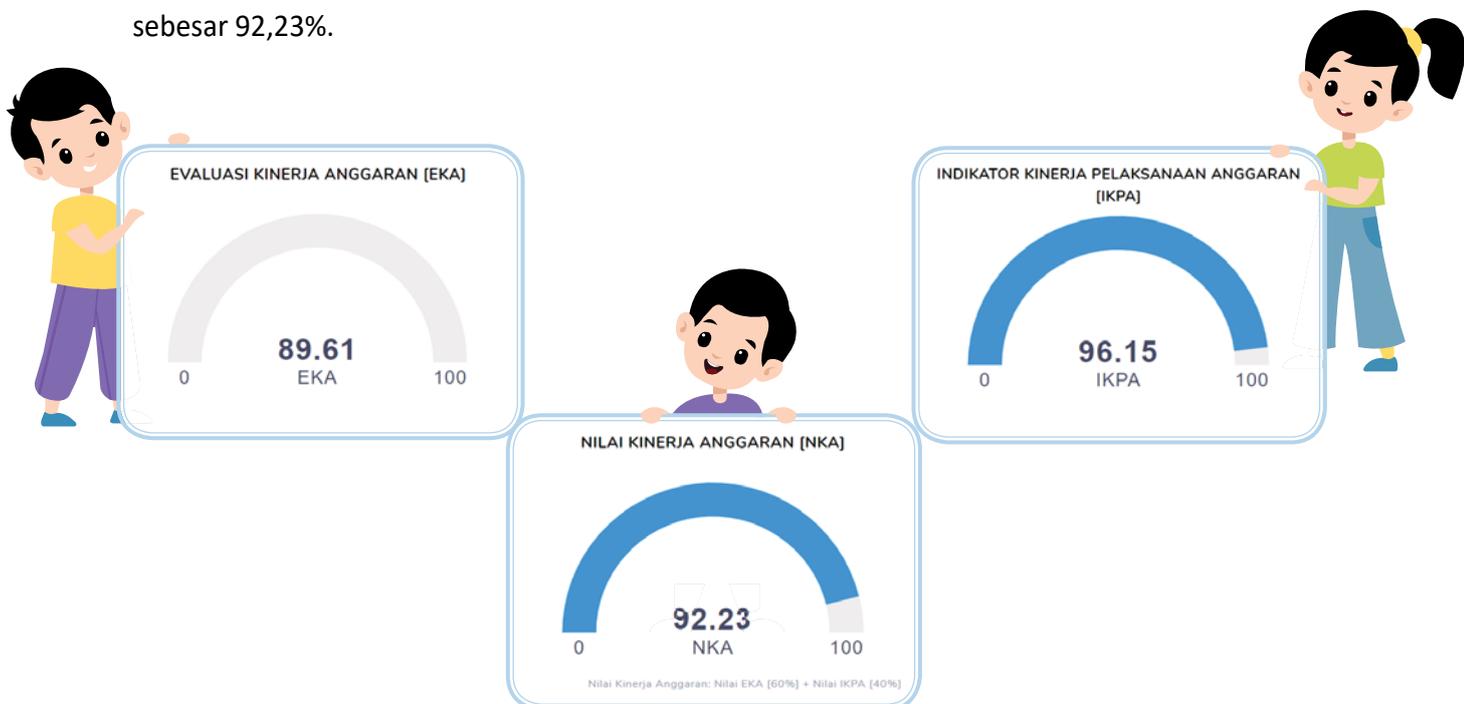
EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Perhitungan capaian NKA =  $[60\% \times \text{Nilai EKA}] + [40\% \times \text{Nilai IKPA}]$



Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan pada tahun 2022, Direktorat PAUD mendapatkan nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA) sebesar 89,61% dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) sebesar 96,15% sehingga nilai kinerja anggaran (NKA) diperoleh sebesar 92,23%.



Sumber data: <https://spasikita.kemdikbud.go.id/> tanggal 24 Januari 2023

Strategi/tindak lanjut yang dilakukan adalah Direktorat PAUD berupaya lebih konsisten dalam pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban laporan keuangan sehingga kinerja yang dihasilkan dapat mencapai hasil maksimal berupa nilai kinerja anggaran lebih baik.

## B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Direktorat PAUD dalam DIPA Revisi ke-7 Tahun 2022 sebesar Rp153.686.640.000,- berhasil direalisasikan sebesar Rp153.214.944.038,- dengan persentase daya serap sebesar 99,69%. Pagu sebesar tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian empat SK dengan delapan IKK. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Program/ Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Jumlah satuan PAUD menerima program afirmasi	Satuan PAUD Mendapatkan pembinaan Afirmasi	Bantuan PAUD Layanan Khusus	5.936.746.000	5.916.367.990	99,66
		Bantuan Pasca Bencana			
Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	Satuan PAUD Menyelenggarakan Pendekatan Holistik Integratif	Bantuan PAUD HI	14.050.290.000	14.006.934.975	99,69
	Satuan PAUD yang melaksanakan program UKS	Bantuan UKS PAUD	7.770.500.000	7.762.051.500	99,89
Jumlah PAUD Penggerak	Satuan PAUD Penggerak yang Mendapatkan Pendampingan	Pendampingan Satuan PAUD Penggerak	12.013.100.000	11.874.702.600	98,85
Persentase satuan PAUD yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	Satuan PAUD yang menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran yang berlaku	Bantuan LBB	11.728.830.000	11.724.807.692	99,97
		Bantuan Program Kesiapan Bersekolah	6.463.174.000	6.461.847.518	99,98
Persentase satuan PAUD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	Lembaga/Mitra PAUD Memperoleh Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Bantuan Pokja Bunda PAUD	26.921.497.000	26.900.902.682	99,92
	Satuan PAUD yang menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran yang berlaku	Bantuan Literasi Dasar	8.545.171.000	8.543.663.900	99,98
	Satuan PAUD Menyelenggarakan Pendekatan Holistik Integratif	BOP PAUD ABK	7.005.035.000	6.983.474.015	99,69
	Satuan PAUD Penggerak yang Mendapatkan Pendampingan	Bantuan Pendampingan Mutu PAUD	10.283.553.000	10.282.459.818	99,99
Persentase satuan PAUD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	Satuan PAUD Memperoleh Bantuan Sarana Pembelajaran termasuk Alat Permainan Edukatif (APE)	Bantuan TIK PAUD	23.441.650.000	23.440.426.805	99,99
	Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	10.920.547.000	10.714.219.032	98,11
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.182.600.000	6.179.733.515	99,95
	Layanan Umum	Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan	2.423.947.000	2.423.351.996	99,98
Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini			0	0	-
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini			0	0	-
<b>Total</b>			<b>153.686.640.000</b>	<b>153.214.944.038</b>	<b>99,69</b>

## C. EFISIENSI ANGGARAN

Tahun 2022, Direktorat PAUD berhasil melakukan efisiensi sebesar 0,72% atau sebesar Rp1.099.876.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp153.686.640.000 dengan rata-rata capaian IKK 131,89% dari 8 IKK. Efisiensi anggaran tersebut diperoleh dari:

1. Pemberian bantuan TIK PAUD berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp918.876.000,- dan hasil efisiensi diperoleh dari pengurangan biaya satuan dan biaya pengiriman untuk paket bantuan yang akan disalurkan. Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk menambah sasaran penerima bantuan TIK PAUD dan juga menambah sasaran pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan TIK yang diperuntukkan bagi penerima bantuan TIK. Efisiensi anggaran ini mendukung pencapaian IKK Persentase satuan PAUD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas.
2. Pemberian bantuan pasca bencana berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp181.000.000,- dan hasil efisiensi diperoleh dari satuan biaya bantuan disesuaikan dengan rincian kebutuhan yang diusulkan sehingga setiap penerima bantuan menerima total bantuan yang berbeda. Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk menambah sasaran penerima bantuan. Efisiensi ini mendukung pencapaian IKK Jumlah satuan PAUD menerima program afirmasi.

## D. PENGHARGAAN, DAN PROGRAM *CROSSCUTTING/COLLABORATIVE*

### 1. Penghargaan

Tahun 2022 Direktorat PAUD menerima penghargaan atas realisasi SV terbesar periode Januari s.d. September 2022.

### 2. Program *Crosscutting/Collaborative*

- a. Program kerja sama Direktorat PAUD dengan UNICEF RI dalam pelaksanaan program PAUD HI dan transisi PAUD – SD pada tahun 2022 dilakukan pendampingan di 3 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bone), Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kota Kupang dan Kabupaten Timur Tengah Selatan), dan Provinsi Papua (Kabupaten Asmat dan Kabupaten Nabire). Selain itu, telah disusun 4 seri Buku Saku Orang Tua Pengembangan Kemampuan Literasi dan Numerasi Anak kelompok usia 5 – 6 Tahun dan 7 – 8 Tahun. Total anggaran dalam pelaksanaan program kerja sama tersebut sebesar **Rp1.162.697.000,-** (satu miliar seratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).





*Pendampingan Program PAUD HI dan Transisi PAUD – SD di Provinsi Papua*



*Buku Saku Orang Tua Pengembangan Kemampuan Literasi dan Numerasi Anak Usia Dini*

- b. Direktorat PAUD ikut berperan dalam pelaksanaan program *crosscutting/collaborative Project Management Office (PMO)* Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PDM) yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada pertengahan tahun 2022.

Tujuan pembentukan PMO PDM dalam pelaksanaan program prioritas untuk mendukung tujuan utama Kemendikbudristek yaitu murid yang memiliki profil pelajar pancasila. Hal ini dilakukan dengan mengubah pola kerja yang lebih inovatif dalam mengelola pelaksanaan program di pemerintahan sesuai dengan amanat Presiden RI.



## PDM 09 - Transformasi Tata Kelola Satuan Pendidikan

### Progress Report - Laporan Perkembangan

Mula Periode	12-09-2022	12-09-2022	12-09-2022	% Capaian	% Samping
<b>PDM-09 Transformasi Tata Kelola Satuan Pendidikan</b>					
1. <b>Stream 1: Sarana Prasarana dan Penataan Pendidikan</b>					
2. <b>Stream 2: Tata Kelola Satuan Pendidikan</b>					
3. <b>Stream 3: Pembinaan Peserta Didik</b>					
<b>Capaian</b>					
1. Proses usulan DAK 2023 telah selesai pembahasan dan posisi menunggu penetapan dari Kemendiknas					
2. Pendampingan pelaksanaan bantuan TIK BA-BUN sudah penempatan sekolah sasaran pencairan dan on proses pengadaannya					
3. Pembinaan tes-itu Aktual terkait <ul style="list-style-type: none"> <li>• FPOD melalui kegiatan reguler, money ke daerah dan masukan dari Ombudsman dan stakeholder terkait</li> <li>• Tatakelola satuan melalui Kajian Strategi Regulasi tatakelola satuan</li> <li>• Tatakelola Sekolah Negeri dan Swasta, SLN, SPN, dan SKD melalui FGD</li> <li>• Masukan terhadap Revisi Permendikbud tentang Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan</li> </ul>					
4. Pendampingan Penguatan Karakter melalui kegiatan Ekstrakurikuler kepada Pembina Ekstrakurikuler di Daerah dan Satuan Pendidikan					
<b>Rencana 2 Minggu Ke Depan</b>					
1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan DAK Fisik 2022					
2. Pendampingan lanjutan Pelaksanaan Pengadaan dan Pemberian Bantuan Penataan Perlatan TIK (revisi BA-BUN) 2022					
3. Pembinaan lebih lanjut terkait tatakelola satuan Pendidikan					
<b>Status Proyek</b>					
Scope	Schedule	Cost	Risk	Quality	
Change	slightly behind schedule	on budget	Medium Risk	Met the Expectations	

## PDM 10 - Pemulihan Pembelajaran

### 1. Project Charter — Pemulihan Pembelajaran

Nama Program			PDM 10 - Pemulihan Pembelajaran		
<b>OBJECTIVE/TUJUAN</b>	<b>ACTIVITY/AKTIVITAS</b>	<b>RESOURCES/SUMBER DATA</b>			
1. Mengembangkan strategi pemulihan pembelajaran terutama di daerah-daerah yang paling tertinggal berdasarkan data ARA (Project Focus pada sekolah dasar)	1. Meninjau lanjut data rekonesansi belajar pada rapor pendidikan hasil AH 2021. 2. Menentukan strategi pemulihan program Pemulihan Pembelajaran bersama dengan unit terkait (BSKAS, Ditjen Dik, Ditjen GTK, Setnas, dan Badan Bahas). 3. Koordinasi dengan unit-unit yang menangani program Pemulihan Pembelajaran: membuat jadwal pertemuan rutin. 4. Pelaksanaan intensifikasi oleh unit utama terkait. 5. Memantau keterlaksanaan Project Charter PDM-10. 6. Mengembangkan dan memonitoring model belajar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supervisor: Koordinator PDM</li> <li>• PIC: S. Idris</li> <li>• PDM-02</li> <li>• PDM-04</li> <li>• PDM-05</li> <li>• PDM-10</li> <li>• PDM-14</li> <li>• Ditjen GTK (PDP)</li> <li>• Puskas, BSAAP</li> <li>• Ditjen Peng. Kampus Mengajar (DKM)</li> <li>• Badan Pengembangan &amp; Pembinaan Bahasa (Badan Buku Literasi)</li> <li>• UPT BSNB, BSNB dan BSN</li> </ul>			
<b>SCOPE/RUANG LINGKUP</b>	<b>DELIVERABLE/KELUARAN</b>	Peringatan Capaian hasil AN 2023			
1. Unit Utama Pusat. 2. UPT 3. Pemerintah Daerah 4. SD dengan capaian AH level 1 dan 2		<b>ANGGARAN</b>			
Bulan Agustus s.d. Desember 2022		Rp. XX			

## PDM 11 - Transformasi Organisasi

### Project Charter PDM-11

<b>Nama Program:</b> Transformasi Organisasi	<b>Activity/Aktivitas:</b> 1. Mengumpulkan bahan project charter, progress report, dan risk management masing-masing PMO 2. Menyusun panduan penjadwalan pertemuan rutin setiap PMO 3. Meminimalisir keterlaksanaan jadwal dan rencana dengan progress aktual dari pekerjaan yang telah dilaksanakan setiap periode waktu dari masing-masing PMO 4. Menyusun indikator dan tools untuk memantau perkembangan pekerjaan setiap PMO 5. Memastikan Google Drive menyimpan dokumen terupdate seluruh PMO
<b>Objective/Tujuan:</b> 1. Memastikan Tim PMO PDM menyusun project charter, progress report, dan risk management 2. Mengkoordinasikan jadwal setiap PMO 3. Menyusun perkembangan pekerjaan dalam periode tertentu dari setiap PMO	<b>Resources/Sumber Daya:</b> 1. Tim SKM: Saut M. Simatupang, Evi Silalahi, Indah Nurkamala, Lisa Silaban, Fedy Djunaedi 2. Tim Kantor Staf Ditjen PDM 3. Tim Supervisor, PIC, Project Admin, dan anggota 18 PMO PDM
<b>Scope/Ruang Lingkup:</b> 1. 18 PMO PDM	<b>Timeframe:</b> Agustus – Desember 2022
<b>Deliverable/Keluaran:</b> 1. Jadwal dan tahapan pekerjaan setiap PMO 2. Dokumen setiap PMO 3. Laporan capaian target tahunan setiap PMO 4. Laporan akhir tahun capaian target setiap PMO	<b>Anggaran:</b> Rp XXX

## PDM 12 - Pengadaan TIK

### Project Charter PDM-12

<b>Nama Program:</b> Pengadaan TIK	<b>Activity/Aktivitas:</b> 1. Koordinasi dengan Tim Pengadaan, Tim Pakja Keuangan dan BSN, Tim Inspektur Jendral, dan Tim Rakjasa Agung RI dalam persiapan dokumen pendukung, penyusunan dokumen pengadaan, pelaksanaan pengadaan, pelaksanaan pekerjaan (pengiriman dan BAST) (Objective 1) 2. Menjaga pelaksanaan program bantuan TIK sesuai <b>peraturan perundang-undangan</b> yang berlaku 3. Bantuan TIK sampai <b>tepat waktu</b> sesuai jadwal dan tidak melewati tahun anggaran 4. Bantuan TIK <b>berdayaguna</b> dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran 5. <b>Crosscheck</b> data satuan pendidikan penerima bantuan perlatan TIK yang telah ditetapkan oleh seluruh Direktorat dengan data penerima bantuan TIK melalui APBN tahun 2020-2022 dan DAK tahun 2021-2023 (Objective 2) 6. Pelatihan kepada penerima bantuan dalam <b>pemeliharaan, pemeliharaan, dan penggunaan</b> perlatan TIK (Objective 3) 7. <b>Monitoring</b> pendayagunaan perlatan TIK bersama Pemda dan UPT yang akan dilaksanakan di tahun 2023
<b>Objective/Tujuan:</b> 1. Menjaga pelaksanaan program bantuan TIK sesuai <b>peraturan perundang-undangan</b> yang berlaku 2. Bantuan TIK sampai <b>tepat waktu</b> sesuai jadwal dan tidak melewati tahun anggaran 3. Bantuan TIK diterima <b>tepat sasaran</b> 4. Bantuan TIK <b>berdayaguna</b> dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran	<b>Resources/Sumber Daya:</b> 1. Tim Pengadaan TIK (Setidjen PDM, Direktorat, dan Biro Umum P8) 2. Tim Rakjasa Agung RI 3. Tim Inspektur Jendral
<b>Scope/Ruang Lingkup:</b> 1. 15.868 satuan pendidikan penerima bantuan perlatan TIK	<b>Timeframe:</b> September – Desember 2022 1. Saat Surat Perintah Anggaran Pengeluaran TIK dari bagian anggaran berstatus umum (lembaga 3a 999) 2. Saat Surat Perintah Anggaran Pengeluaran TIK dari bagian anggaran berstatus khusus (lembaga 3a 999) 3. Saat akhir Berita Acara Terma (BAST)
<b>Deliverable/Keluaran:</b> 1. Jadwal dan tahapan pekerjaan pelaksanaan pengadaan TIK 2. Laporan periodik pelaksanaan pengadaan TIK 3. <b>Monitoring</b> pendayagunaan perlatan TIK	<b>Anggaran:</b> Rp 1,65 T

## PDM 13 - Transformasi Pendidikan Khusus

### Project Charter (1-3)

Nama Program			PDM-13 Transformasi Pendidikan Khusus		
<b>OBJECTIVE/TUJUAN</b>	<b>ACTIVITY/AKTIVITAS</b>	<b>RESOURCES/SUMBER DATA</b>			
1. Mengkaji kondisi existing implementasi skema pembinaan pendidikan khusus (Penyandang disabilitas, Siswa cerdas dan bakat istimewa di Sekolah/satuan pendidikan khusus, sekolah/satuan pendidikan khusus, sekolah/satuan pendidikan khusus inklusi) 2. Mendorong penguatan dan penataan regulasi-regulasi pendidikan khusus 3. Menyusun model pembinaan pendidikan khusus dalam kerangka kurikulum merdeka 4. Menyusun draft program penguatan literasi dan numerasi pendidikan khusus penyandang disabilitas 5. Menyusun draft skema advokasi UPT kepada dinas terkait fasilitas pembinan pendidikan khusus di daerah	1. Analisis Data Pendidikan Khusus (Penyandang disabilitas, Siswa cerdas dan bakat istimewa di Sekolah/satuan pendidikan khusus, sekolah/satuan pendidikan khusus inklusi) 2. Pemetaan Sumber Daya Pendidikan Khusus (Perguruan Tinggi, NGO, Satuan Pendidikan, Kementerian/Lembaga dll) 3. Riset kebijakan Pendidikan Khusus bagi Penyandang Disabilitas (benchmarking) 4. Pengembangan konsep transformasi pendidikan khusus 5. Koordinasi penyelarasan transformasi pendidikan khusus (PDM 13, Lintas PDM, Lintas Steering Committee, Pusat dan Daerah) 6. FGD Penguatan literasi dan numerasi Pendidikan Khusus 7. FGD Pengembangan Pendidikan Siswa Cerdas dan Bakat Istimewa 8. Pemetaan dan penguatan regulasi pendidikan khusus	Tim Konsultan Supervisor PIC Konsultan PIC Lintas Sektor 1. Setidjen PAUDASMIEN 2. Direktorat PAUD 3. Direktorat SMP 4. Direktorat SMA 5. Direktorat PKPK 7. GTK 8. BSKAP 9. VOKASI 10. PSPK 11. BNSP 12. UPT 13. Dinas Pendidikan			

## PDM 14 - Gerakan Sekolah Sehat

### 1. Project Charter — GERAKAN SEKOLAH SEHAT

Nama Program			Gerakan Sekolah Sehat		
<b>OBJECTIVE/TUJUAN</b>	<b>ACTIVITY/AKTIVITAS</b>	<b>RESOURCES/SUMBER DATA</b>			
A. Mengembangkan kampanye sekolah sehat B. Fasilitas pelaksanaan kampanye SAS dan Aksi Bergei C. Realisasi UKS di setiap satuan pendidikan	1. Melakukan penyiapan program Gerakan Sekolah Sehat dengan program di masing-masing U/L 2. Menyusun desain konsep sekolah sehat 3. Melakukan internal SDM tentang program Gerakan sekolah sehat 4. Launching kampanye sekolah sehat 5. Penyiapan program sekolah sehat dengan program yang relevan dan mitra pembangunan 6. Kolaborasi dengan PMO PDM-05 dalam rangka advokasi sekolah sehat di tingkat daerah 7. Kolaborasi dengan PMO PDM-10 terkait advokasi sekolah sehat dalam rangka pemulihan pembelajaran 8. Kolaborasi dengan PMO PDM-07 dalam rangka Sosialisasi, Publikasi, Advokasi Gerakan Sekolah Sehat 1. Mendukung terlaksananya Gerakan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (SIS) (Setidjen) 2. Mendukung pemberian Tablet Tambah Garam di Satuan Pendidikan (SMP dan SMA) 1. Melakukan kajian pelaksanaan UKS di satuan pendidikan 2. Penyusunan kerangka revitalisasi UKS di satuan pendidikan 3. Mengimplementasikan kegiatan revitalisasi UKS di satuan pendidikan 4. Mengembangkan kelembagaan UKS (Tim Pembina UKS) 5. Melakukan pemantauan UKS	SKM: Hekki PDM: Muhammad Habi PIC: Retno Wulandari PIC: Lintas Sektor 1. Setidjen 2. Direktorat PAUD 3. Direktorat SD 4. Direktorat SMP 5. Direktorat SMA 6. Direktorat PKPK 7. PMO PDM 07 8. PMO PDM 10			
<b>SCOPE/RUANG LINGKUP</b>	<b>DELIVERABLE/KELUARAN</b>				
U/L, Negeri, kemendikbudristek, Kemendes, kemendagri	1. Output 1: realisasinya kampanye gerakan sekolah sehat di satuan pendidikan 2. Output 2: terfasilitasinya gerakan imunisasi bagi anak sekolah dan Pemberian Tablet Tambah Garam 3. Output 3: terlaksananya revitalisasi UKS di satuan pendidikan				
<b>TIMEFRAME</b>	<b>ANGGARAN</b>	Bulan Agustus – Desember 2022 Rp. XX Miliar			

## PDM 15 - Sumber Daya Sekolah

### Project Charter: Sumber Daya Sekolah

Nama Program			PDM15 – Sumber Daya Sekolah		
<b>Objective/Tujuan</b>	<b>Activity/Aktivitas</b>				
1. Seluruh satuan pendidikan menggunakan aplikasi RKAS dalam pengelolaan BOS/P 2. Seluruh satuan pendidikan melaksanakan PBI melalui aplikasi SIPSLAH 3. Meningkatkan penerapan aplikasi TanyabOS sebagai forum tanya jawab BOS dan BOP di luar sekolah penggerak	<b>Pelaksanaan</b> 1. Koordinasi pengembangan otomasi ARKAS, PBD, dan Rapor Pendidikan dan pengujian PBI Pelajar Pancasila 2. Synchronisasi referensi kegiatan ARKAS dengan PBD 3. Pengembangan materi ARKAS, SIPSLAH, TanyabOS (Platform SDS) 4. Optimalisasi layanan Helpdesk pada aplikasi TanyabOS 5. Penyusunan dan revisi Regulasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan penggunaan ARKAS dan SIPSLAH  <b>Pelaksanaan</b> 1. Bimtek dan pendampingan penggunaan platform SDS untuk UPT, Pemda dan Satpen 2. Kemirisan dan koordinasi PMO Pusat yang relevan, PMO UPT 3. Optimalisasi Komunitas Belajar  <b>Money</b> 1. Monitoring dan Evaluasi berkerja sama dengan PSKP dan PMO yang relevan serta UPT 2. Pengembangan Dashboard Monitoring Adoption Rate Platform SDS				

## PDM 16 - Penguatan Karakter dan Profil Pelajar Pancasila

### 1. Project Charter PDM-16

Nama Program			PDM-16 – Penguatan Karakter dan Profil Pelajar Pancasila		
<b>OBJECTIVE/TUJUAN</b>	<b>ACTIVITY/AKTIVITAS</b>	<b>RESOURCES/SUMBER DATA</b>			
1. Mengembangkan strategi pemulihan pembelajaran terutama di daerah-daerah yang paling tertinggal berdasarkan data ARA (Project Focus pada sekolah dasar)	1. Melakukan kajian tentang peran dan fungsi PDM-16, Lintas PDM (PDI, DSD, dan UPT) dan pemantauan kinerja secara berkala 2. Melakukan strategi komunikasi untuk membangun energi dan jama ke dalam kerangka pengajaran reguler dan pembelajaran PBI Pelajar Pancasila melalui kampanye AH 3.00a hasil (berorientasi, wawasan belajar, dan literasi) 3. Melakukan desain dan pengembangan materi pembelajaran PBI Pelajar Pancasila, termasuk kampanye AH 3.00a hasil (berorientasi, wawasan belajar, dan literasi); 4. Melakukan kampanye reguler PDI di kelas UPT 5. Melakukan kampanye reguler PDI di kelas UPT dan kelas belajar digital yang terintegrasi dengan unit UPT dan literasi numerasi 6. Melakukan kampanye reguler PDI di kelas UPT dan kelas belajar digital yang terintegrasi dengan unit UPT dan literasi numerasi 7. Melakukan kampanye reguler PDI di kelas UPT dan kelas belajar digital yang terintegrasi dengan unit UPT dan literasi numerasi 8. Melakukan kampanye reguler PDI di kelas UPT dan kelas belajar digital yang terintegrasi dengan unit UPT dan literasi numerasi 9. Melakukan kampanye reguler PDI di kelas UPT dan kelas belajar digital yang terintegrasi dengan unit UPT dan literasi numerasi 10. Melakukan kampanye reguler PDI di kelas UPT dan kelas belajar digital yang terintegrasi dengan unit UPT dan literasi numerasi 11. Melakukan kampanye reguler PDI di kelas UPT dan kelas belajar digital yang terintegrasi dengan unit UPT dan literasi numerasi 12. Melakukan kampanye reguler PDI di kelas UPT dan kelas belajar digital yang terintegrasi dengan unit UPT dan literasi numerasi 13. Melakukan kampanye reguler PDI di kelas UPT dan kelas belajar digital yang terintegrasi dengan unit UPT dan literasi numerasi	Supervisor: Dr. Arman Agung (PIC, Direktorat PAUD) PIC: Dr. Lanny Anggraini, S.P.A., M.A. (Direktorat SD)  <b>SKM</b> 1. Maja Hekki 2. Mas Del  <b>Puspika</b> 1. Hendrianto, Ph.D. (PIC, KA-Pusdiklat) 2. Roperta Putri Utami (Analis Kebijakan Ahli Madya) 3. Agus M. Solichin (Analis Kebijakan Ahli Madya)  <b>Anggota PDM-16:</b> Setidjen PAUD/Direktorat PAUD Direktorat PAUD Direktorat SMA Direktorat PKPK  <b>UPT/Mitra Pembangunan:</b> 1. BSNB/BSBP 3. UNICEF 5. INOVASI 2. BSNB/BSBP 4. Save the Children			
<b>SCOPE/RUANG LINGKUP</b>	<b>DELIVERABLE/KELUARAN</b>				
Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan	1. Output 1: realisasinya kampanye gerakan sekolah sehat di satuan pendidikan 2. Output 2: terfasilitasinya gerakan imunisasi bagi anak sekolah dan Pemberian Tablet Tambah Garam 3. Output 3: terlaksananya revitalisasi UKS di satuan pendidikan				
<b>TIMEFRAME</b>	<b>ANGGARAN</b>	Bulan September – bulan Desember 2022 Rp. XX Miliar			

## PDM 17 - Asesmen Nasional

### 1. Project Charter PDM-17

NAMA PROGRAM		PDM-17 Asesmen Nasional	
<b>OBJECTIVE/TUJUAN</b>	<b>ACTIVITY/AKTIVITAS</b>	<b>RESOURCES/SUMBER DATA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Desain Kebijakan dan Petunjuk Teknis (POS) Pelaksanaan AN dan Sulingjar 2023;</li> <li>Meningkatkan pemahaman stakeholder daerah tentang AN serta tindak lanjut pemanfaatan hasil AN untuk pemetaan mutu pendidikan;</li> <li>Semua satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Pendidikan Kesetaraan mengikuti AN 2023;</li> <li>Semua guru dan kepala sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Pendidikan Kesetaraan mengikuti Sulingjar 2023;</li> <li>Semua Provinsi dan Kabupaten/kota memiliki Profil dan Rapor Pendidikan;</li> <li>Menambatkan pelaksanaan AN dan Sulingjar tahun 2023 berjalan dengan baik dan lancar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi persiapan dan pelaksanaan Sulingjar;</li> <li>Koordinasi persiapan pelaksanaan AN;</li> <li>Identifikasi potensi dan mitigasi kendala pelaksanaan AN;</li> <li>Sosialisasi dan Advokasi AN;</li> <li>Pemantauan pelaksanaan AN;</li> <li>Diteminasi hasil AN sebagai bagian dari evaluasi sistem Pendidikan;</li> <li>Pemutusan program tindak lanjut berdasarkan hasil AN;</li> <li>Pendampingan tindak lanjut hasil AN.</li> </ol>	<b>Kemendikbud</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dirjen PDM</li> <li>Kepala BSKAP</li> <li>Direktur di lingkungan Dirjen PDM</li> <li>SesDitjen PDM</li> <li>Kapusmendik</li> <li>Kapusditin</li> </ol> <b>Tim SKM</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fiona Handayani</li> <li>Saut M. Simatupang</li> <li>Feddy Junardi</li> <li>Sentoso</li> </ol> <b>UPT:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>BBPMP</li> <li>BPMP</li> </ol> <b>Narasumber</b> Terlampir di TOR Kegiatan	
<b>SCOPE/RUANG LINGKUP</b>	<b>DELIVERABLE/KELUARAN</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Unit Pelaksana Teknis</li> <li>Dirnas Pendidikan Provinsi</li> <li>Dirnas Pendidikan Kabupaten/Kota</li> <li>Satuan Pendidikan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>POS AN dan Lulris Sulingjar;</li> <li>Materi Sosialisasi</li> <li>Data Partisipasi AN;</li> <li>Data Partisipasi Sulingjar;</li> <li>Laporan Pemantauan Pelaksanaan AN dan Sulingjar;</li> <li>Laporan Hasil Analisis Data AN;</li> <li>Rancangan program tindak lanjut.</li> </ol>		
<b>TIMEFRAME</b>	<b>ANGGARAN</b>		
Bulan Januari s.d. Desember 2023	Rp xx Milyar		
<small>1. BIKEN PAUD, 2020(A), 2019 (BIMEN) - KEMENDIKBUD/DIRJEN PDM</small>		3	

## PDM 18 - Transisi PAUD SD

### A. Project Charter PDM Transisi PAUD SD

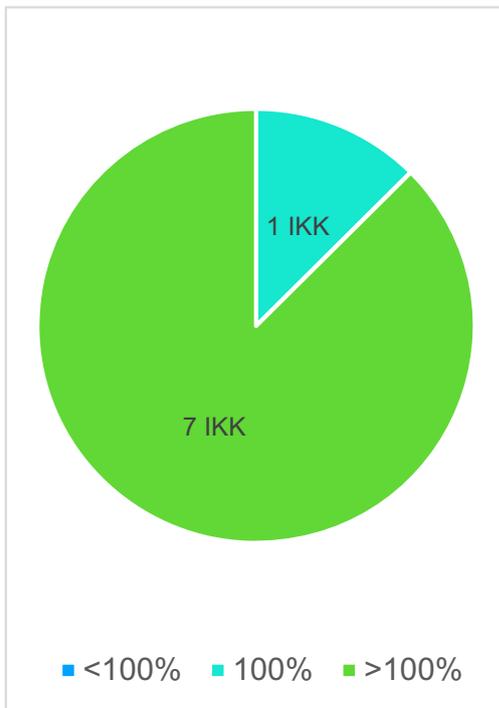
NAMA PROGRAM		PDM Transisi PAUD-SD	
<b>OBJECTIVE/TUJUAN</b>	<b>ACTIVITY/AKTIVITAS</b>	<b>RESOURCES/SUMBER DATA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh Kabupaten/kota menjalankan paket intervensi yang perlu dilakukan untuk mendukung transisi PAUD-SD</li> <li>Seluruh satuan pendidikan sekolah dasar menerapkan praktik penerimaan peserta didik serta pembelajaran yang selaras dengan visi transisi PAUD-SD di kelas 1 SD, utamanya bagi anak kelas 1 SD yang tidak pernah berpartisipasi di PAUD.</li> <li>Guru di PAUD dan sekolah dasar memiliki wadah untuk berkoordinasi dan belajar bersama.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Regulasi : surat edaran kepada dinas berisikan instruksi konkret</li> <li>Pembelajaran:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>Mapping linearitas CP Fase Fondasi dan Fase A</li> <li>Desain modul ajar untuk kelas 1 SD yang tidak mengikut fase fondasi</li> <li>Contoh konten asesmen di PAUD untuk kelas 1 SD yang selaras dengan desain pembelajaran anak usia dini</li> <li>Modul bimtek untuk guru PAUD dan guru SD</li> </ul> </li> <li>Komunikasi: identifikasi media kampanye</li> <li>Monev: Satuan pendidikan SD mempunyai sumber daya optimal untuk memperlengkapi siswa transisi PAUD SD (menggunakan alat instrumen yang sudah ada)</li> </ol>	<b>Kemendikbud</b> <b>SKM:</b> Fiona Handayani <b>PS:</b> Moh Haidi <b>PM:</b> Berlyana Evidawati  <b>Tim SKM:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Saut Simatupang</li> <li>Fitri Anggrani</li> </ol> <b>Tim Konsultan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nurman Siagian</li> </ol> <b>Satker Pusat dan Daerah:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dirsektorat SD</li> <li>Dirsektorat PAUD</li> <li>Puskarja</li> <li>Dirsektorat Guru PAUD dan Ditmas</li> <li>Dirsektorat Guru Pendidikan Dasar</li> <li>UPT (BBPMP-BPMP)</li> </ol>	
<b>SCOPE/RUANG LINGKUP</b>	<b>DELIVERABLE/KELUARAN</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Daerah</li> <li>Satuan Pendidikan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pesan bersama tentang transisi PAUD-SD</li> <li>Aksi konkret untuk tindak lanjut oleh dinas, satuan, dan masyarakat</li> <li>Rencana Komunikasi (Kampanye)</li> <li>Materi ajar di PDM</li> <li>Modul Bimtek Guru</li> </ol>		
<b>TIMEFRAME</b>	<b>ANGGARAN</b>		
Bulan September 2022 - 2023	Rp xx Milyar		



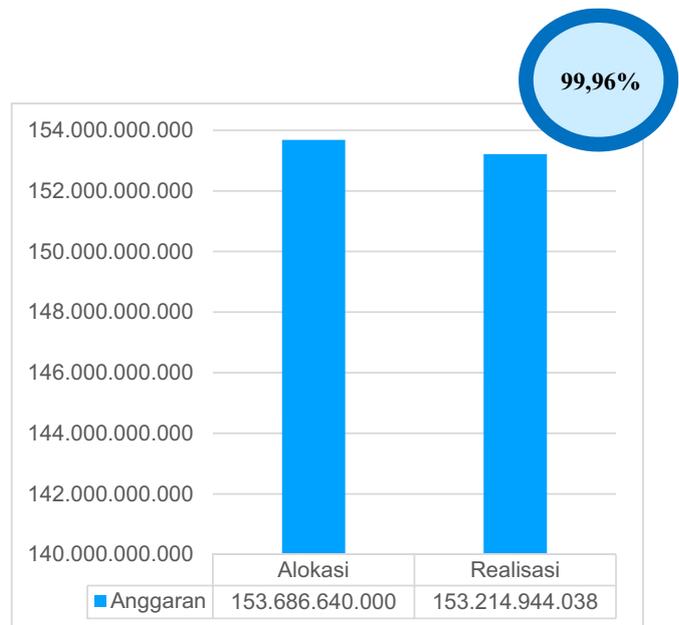
# PENUTUP

Kinerja Direktorat PAUD tahun 2022, secara keseluruhan dinyatakan berhasil karena rata-rata capaian IKK sebesar 131,89% dari delapan IKK yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022. Capaian IKK tersebut didukung kinerja keuangan dengan penggunaan anggaran sebesar Rp153.214.944.038,- dari total alokasi anggaran sebesar Rp153.686.640.000,-

## Capaian Indikator Kinerja



## Kinerja Keuangan



Berdasar pada hasil evaluasi kinerja, berikut beberapa hal yang perlu mendapat perhatian.

1. Jumlah satuan PAUD yang belum tersebar secara merata karena masih banyaknya desa yang belum memiliki layanan PAUD.
2. Miskonsepsi tentang PAUD berkualitas masih harus diinformasikan dengan lebih luas sehingga mutu pembelajaran PAUD bisa lebih meningkat.
3. Sarana pembelajaran PAUD terutama dalam hal transformasi digital belum merata serta pemanfaatan belum maksimal untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di satuan PAUD.



Untuk meningkatkan kinerja Direktorat PAUD, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan yaitu:

1. Pemenuhan satu desa satu PAUD melalui koordinasi dengan Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Dalam Negeri.
2. Melakukan sosialisasi dan mendorong mitra PAUD atau stakeholder lainnya untuk menjadikan sembilan seri panduan PAUD Berkualitas sebagai pedoman dalam penyelenggaraannya di daerah.
3. Mengusulkan pengalokasian anggaran pemenuhan TIK melalui DAK Fisik dan melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan TIK.



# LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Awal
- Perjanjian Kinerja Revisi
- Pengukuran Kinerja
- Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu
- Surat Keputusan Tim Koordinasi Pelaporan Kinerja Tahun 2022



**Perjanjian Kinerja Tahun 2022  
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini  
Dengan  
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Dr. Muhammad Hasbi**

**Jabatan : Direktur Pendidikan Anak Usia Dini**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Jumeri, S.TP.,M.Si.**

**Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 28 Maret 2022

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah**

**Direktur Pendidikan Anak Usia Dini**



**Jumeri, S.TP.,M.Si.**



**Dr. Muhammad Hasbi**

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas	[IKK 1.1] Jumlah satuan PAUD menerima program afirmasi	100
2	[SK 2] Meningkatnya capaian perkembangan PAUD yang berkualitas	[IKK 2.1] Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	30.66
3	[SK 3] Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas	[IKK 3.1] Jumlah PAUD Penggerak	2000
		[IKK 3.2] Persentase satuan PAUD yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	0.98
		[IKK 3.3] Persentase satuan PAUD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	0.98
		[IKK 3.4] Persentase satuan PAUD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	10.21
4	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	[IKK 4.1] Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	A
		[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	85

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4272	Pembinaan PAUD	Rp. 6.268.846.000
2	4459	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 109.700.000.000
3	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 19.612.454.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 135.581.300.000</b>

Jakarta, 28 Maret 2022

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah**



**Jumeri, S.TP., M.Si.**

**Direktur Pendidikan Anak Usia Dini**



**Dr. Muhammad Hasbi**



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022**  
**Plt. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini**  
**Dengan**  
**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Komalasari**

**Jabatan : Plt. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Iwan Syahril**

**Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 26 Desember 2022

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah,**

**Plt. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini,**



**Iwan Syahril**



**Komalasari**

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas	[IKK 1.1] Jumlah satuan PAUD menerima program afirmasi	100
2	[SK 2] Meningkatnya capaian perkembangan PAUD yang berkualitas	[IKK 2.1] Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	30.66
3	[SK 3] Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas	[IKK 3.1] Jumlah PAUD Penggerak	2000
		[IKK 3.2] Persentase satuan PAUD yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	0.98
		[IKK 3.3] Persentase satuan PAUD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	0.98
		[IKK 3.4] Persentase satuan PAUD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	10.21
4	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	[IKK 4.1] Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	A
		[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	85

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4272	Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 29.378.396.000
2	4459	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 104.781.150.000
3	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 19.527.094.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 153.686.640.000</b>

Jakarta, 26 Desember 2022

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah,**

**Plt. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini,**



**Iwan Syahril**



**Komalasari**



Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan  
DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
Tahun 2022

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[SK 1.0] Tersedianya layanan PAUD yang merata dan berkualitas	[IKK 1.1] Jumlah satuan PAUD menerima program afirmasi	Lembaga	100	TW1 : 0 TW2 : 20 TW3 : 50 TW4 : 100	TW1 : 0 TW2 : 69 TW3 : 100 TW4 : 113	<p><b>TW1 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Semua kegiatan yang mendukung IKK ini masih dalam proses persiapan, pelaksanaan sosialisasi, dan penyusunan pedoman pelaksanaan <b>Kendala / Permasalahan :</b> Kendala pada awal tahun adalah sinkronisasi semua program kegiatan yang harus mendukung program prioritas sehingga terdapat penyesuaian program yang mengakibatkan jadwal yang telah ditetapkan mengalami perubahan. <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Berkoordinasi intens dengan tim peta jalan untuk penyesuaian program kegiatan dengan program prioritas</p> <p><b>TW2 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Kegiatan yang mendukung IKK ini adalah penyaluran Bantuan PAUD Layanan Khusus ke 69 lembaga penerima. <b>Kendala / Permasalahan :</b> Tidak ada kendala dalam pencapaian target triwulan 2. <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Mempercepat sisa penyaluran bantuan dengan melakukan koordinasi pada lokasi yang telah dipilih.</p> <p><b>TW3 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Kegiatan yang mendukung capaian IKK ini adalah pemberian bantuan PAUD layanan khusus yang telah selesai disalurkan ke 100 satuan PAUD dengan tujuan agar desa yang belum memiliki satuan PAUD dapat mendirikan satuan PAUD dengan menggunakan dana bantuan sebesar Rp30.000.000 sebagai dana stimulan dan harus didampingi oleh dana desa di wilayah tersebut. <b>Kendala / Permasalahan :</b> Sulitnya untuk menyadarkan perangkat desa (desa yang belum memiliki layanan PAUD) bahwa PAUD itu penting dan dana desa bisa digunakan untuk penyelenggaraan layanan PAUD sehingga dapat mengakses bantuan ini. <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Harus lebih diaktifkan kembali sosialisasi mengenai dana desa yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan layanan PAUD di desa.</p> <p><b>TW4 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Kegiatan yang mendukung capaian IKK ini adalah pemberian bantuan PAUD layanan khusus yang telah selesai disalurkan ke 100 satuan PAUD dengan tujuan agar desa yang belum memiliki satuan PAUD dapat mendirikan satuan PAUD dengan menggunakan dana bantuan sebesar Rp30.000.000 sebagai dana stimulan dan harus didampingi oleh dana desa di wilayah tersebut. Kegiatan lain yang mendukung capaian IKK ini adalah pemberian bantuan pasca bencana yang telah disalurkan ke 13 satuan PAUD yang terkena dampak bencana alam. <b>Kendala / Permasalahan :</b> Untuk daerah afirmasi yang belum memiliki layanan PAUD, dalam hal perizinan masih banyak permasalahan dikarenakan peraturan atau kebijakan di masing-masing daerah berbeda. Begitu pula halnya dalam penggunaan dana desa, kebijakan yang berbeda di masing-masing daerah sehingga tidak semua daerah memfokuskan pada Pendidikan Anak Usia Dini. Jumlah satuan PAUD yang terkena dampak bencana lebih banyak dibandingkan dengan anggaran bantuan yang tersedia sehingga hanya sebagian kecil yang dapat difasilitasi untuk satuan PAUD melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan padahal di DAK fisik pun belum terakomodir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Koordinasi dan sosialisasi dengan daerah mengenai perizinan dan penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan layanan PAUD lebih ditingkatkan melalui pedoman atau media komunikasi lainnya. Memasukkan menu untuk bantuan pasca bencana di DAK fisik PAUD.</p>

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

2	[SK 2.0] Meningkatnya capaian perkembangan PAUD yang berkualitas	[IKK 2.1] Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	%	30.66	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 0</b> <b>TW3 : 0</b> <b>TW4 : 30.66</b>	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 0</b> <b>TW3 : 0</b> <b>TW4 : 45.99</b>	<p><b>TW1 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>          Semua kegiatan yang mendukung IKK ini masih dalam proses persiapan, pelaksanaan sosialisasi, dan penyusunan pedoman pelaksanaan  <b>Kendala / Permasalahan :</b>          Kendala pada awal tahun adalah sinkronisasi semua program kegiatan yang harus mendukung program prioritas sehingga terdapat penyesuaian program yang mengakibatkan jadwal yang telah ditetapkan mengalami perubahan  <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>          Berkoordinasi intens dengan tim peta jalan untuk penyalarsan program kegiatan dengan program prioritas</p> <p><b>TW2 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>          Kegiatan yang mendukung IKK ini, antara lain: 1. Penyaluran bantuan PAUD HI ke 50 lembaga penerima dalam rangka memberikan pendampingan ke minimal 100 satuan PAUD untuk masing-masing lembaga penerima.; 2. Penyaluran bantuan UKS PAUD ke 500 satuan PAUD penerima.; dan 3. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis calon fasilitator PAUD HI untuk 2 angkatan dari 4 angkatan.;  <b>Kendala / Permasalahan :</b>          Tidak ada masalah dalam pencapaian target triwulan 2.  <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>          Menyelesaikan kegiatan bimbingan teknis calon fasilitator 2 angkatan sehingga 50 kabupaten/kota dapat segera melaksanakan program PAUD HI di daerah</p> <p><b>TW3 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>          Kegiatan yang mendukung IKK ini, antara lain: 1. Penyaluran bantuan PAUD HI ke 50 lembaga penerima dalam rangka memberikan pendampingan ke minimal 100 satuan PAUD untuk masing-masing lembaga penerima.; 2. Penyaluran bantuan UKS PAUD ke 500 satuan PAUD penerima.; dan 3. Bimbingan teknis calon fasilitator PAUD HI telah dilaksanakan 4 angkatan. Untuk melihat satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif dapat dilihat dari pemenuhan 8 indikator yang tercantum dalam data Dapodik. Untuk menyosialisasikan pengisian 8 indikator tersebut, telah dibuat video tutorial, video layanan PAUD berkualitas, dan sosialisasi melalui sosial media lainnya (Instagram PAUDPEDIA, facebook PAUDPEDIA, youtube PAUDPEDIA, website PAUDPEDIA) agar Dapodik lebih dapat terbarukan sehingga pencapaian IKK ini bisa memenuhi target.  <b>Kendala / Permasalahan :</b>          Banyak satuan PAUD yang telah memenuhi 8 indikator layanan PAUD HI, tetapi belum melakukan pembaruan 8 indikator di Dapodik sehingga tidak terdata sebagai satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif  <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>          Menyosialisasikan pengisian 8 indikator layanan PAUD HI yang harus selalu terbarukan dan 8 indikator ini adalah yang dapat menyatakan bahwa satuan PAUD tersebut telah melakukan layanan holistik integratif</p> <p><b>TW4 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>          Kegiatan yang mendukung IKK ini, antara lain: 1. Penyaluran bantuan PAUD HI ke 50 lembaga penerima dalam rangka memberikan pendampingan ke minimal 100 satuan PAUD untuk masing-masing lembaga penerima.; 2. Penyaluran bantuan UKS PAUD ke 500 satuan PAUD penerima.; dan 3. Bimbingan teknis calon fasilitator PAUD HI telah dilaksanakan 4 angkatan. Untuk melihat satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif dapat dilihat dari pemenuhan 8 indikator yang tercantum dalam data Dapodik. Untuk menyosialisasikan pengisian 8 indikator tersebut, telah dibuat video tutorial, video layanan PAUD berkualitas, dan sosialisasi melalui sosial media lainnya (Instagram PAUDPEDIA, facebook PAUDPEDIA, youtube PAUDPEDIA, website PAUDPEDIA) agar Dapodik lebih dapat terbarukan sehingga pencapaian IKK ini bisa memenuhi target.  <b>Kendala / Permasalahan :</b>          Berikut hasil penghitungan persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan PAUD-HI; 1) persentase satuan PAUD yang memenuhi 8 indikator layanan PAUD HI masih sedikit yaitu baru mencapai 6,23%; 2) persentase satuan PAUD yang memenuhi 7 indikator mencapai 45,99%; 3) persentase satuan PAUD yang memenuhi 6 indikator mencapai 76,74%; 4) persentase satuan PAUD yang memenuhi 5 Indikator mencapai 90,13%. Untuk pencapaian target 2022 untuk IKK ini, diambil dari penghitungan persentase satuan PAUD yang memenuhi 7 indikator layanan PAUD HI karena telah menunjukkan kualitas satuan yang lebih baik dalam memberikan layanan PAUD HI.  <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>          1) Menyosialisasikan pengisian 8 indikator layanan PAUD HI yang harus selalu terbarukan dan dengan pemenuhan 8 indikator ini dapat menyatakan bahwa satuan PAUD tersebut telah melakukan layanan holistik integratif; 2) Meningkatkan kualitas layanan di setiap satuan PAUD dengan harapan 8 indikator dapat dipenuhi oleh setiap satuan PAUD.</p>
---	---	--	---	-------	--	--	--

3	[SK 3.0] Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas	[IKK 3.1] Jumlah PAUD Penggerak	Lembaga	2000	<b>TW1</b> : 344 <b>TW2</b> : 344 <b>TW3</b> : 1188 <b>TW4</b> : 2000	<b>TW1</b> : 344 <b>TW2</b> : 2012 <b>TW3</b> : 2012 <b>TW4</b> : 2032	<p><b>TW1 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Semua kegiatan yang mendukung IKK ini sudah dalam tahap pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada satuan PAUD penggerak untuk penggunaan BOP Kinerja serta persiapan penyusunan pedoman terkait PAUD penggerak.  <b>Kendala / Permasalahan :</b>  Perbedaan data jumlah satuan PAUD penggerak karena terdapat penambahan satuan PAUD yang lulus seleksi oleh Ditjen GTK tetapi belum ditetapkan oleh Ditjen PAUDdasmen  <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Berkoordinasi intens dengan unit terkait mengenai program sekolah penggerak</p> <p><b>TW2 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Kegiatan yang mendukung IKK ini adalah pelaksanaan pendampingan kepada satuan PAUD penggerak yang telah ditetapkan sebanyak 344 satuan PAUD Penggerak angkatan 1 dan 1.668 satuan PAUD Penggerak angkatan 2. Pendampingan yang dilakukan berupa bimbingan teknis untuk pengelolaan BOP Kinerja serta pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP) di satuan PAUD masing-masing.  <b>Kendala / Permasalahan :</b>  Tidak ada kendala dalam pencapaian target IKK ini dan pencapaian melebihi target dikarenakan semua kegiatan dilakukan dalam bentuk daring dan pendampingan langsung ke masing-masing satuan PAUD penggerak melalui zoom dan WA oleh Direktorat PAUD.  <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Persiapan pendampingan untuk satuan PAUD angkatan 3 dan memaksimalkan tugas fungsi dari Project Management Office (PMO) PSP.</p> <p><b>TW3 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Kegiatan yang mendukung IKK ini adalah pelaksanaan pendampingan kepada satuan PAUD penggerak yang telah ditetapkan sebanyak 344 satuan PAUD Penggerak angkatan 1 dan 1.668 satuan PAUD Penggerak angkatan 2. Pendampingan yang dilakukan berupa bimbingan teknis untuk pengelolaan BOP Kinerja serta pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP) di satuan PAUD masing-masing. Selain itu, telah dilaksanakan pendampingan pelaksanaan PBD pada satuan PAUD penggerak untuk mendukung pelaksanaan program prioritas perencanaan berbasis data (PBD), serta survei lingkungan belajar dikarenakan satuan PAUD penggerak telah lebih dahulu melaksanakan implementasi kurikulum merdeka (IKM).  <b>Kendala / Permasalahan :</b>  Tidak ada kendala dalam pencapaian target IKK ini dan pencapaian melebihi target dikarenakan semua kegiatan dilakukan dalam bentuk daring dan pendampingan langsung ke masing-masing satuan PAUD penggerak melalui zoom dan WA oleh Direktorat PAUD.  <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Melakukan pendampingan ke satuan PAUD penggerak dan memaksimalkan tugas fungsi dari Project Management Office (PMO) PSP.</p> <p><b>TW4 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Kegiatan yang mendukung IKK ini adalah pelaksanaan pendampingan kepada satuan PAUD penggerak yang telah ditetapkan sebanyak 344 satuan PAUD Penggerak angkatan 1 dan 1.668 satuan PAUD Penggerak angkatan 2. Pendampingan yang dilakukan berupa bimbingan teknis untuk pengelolaan BOP Kinerja serta pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP) di satuan PAUD masing-masing. Selain itu, telah dilaksanakan pendampingan pelaksanaan PBD pada satuan PAUD penggerak untuk mendukung pelaksanaan program prioritas perencanaan berbasis data (PBD), serta survei lingkungan belajar dikarenakan satuan PAUD penggerak telah lebih dahulu melaksanakan implementasi kurikulum merdeka (IKM).  <b>Kendala / Permasalahan :</b>  Tidak ada kendala dalam pencapaian target IKK ini dan pencapaian melebihi target dikarenakan semua kegiatan dilakukan dalam bentuk daring dan pendampingan langsung ke masing-masing satuan PAUD penggerak melalui zoom dan WA oleh Direktorat PAUD.  <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Melakukan pendampingan ke satuan PAUD penggerak dan memaksimalkan tugas fungsi dari Project Management Office (PMO) PSP.</p>
---	---	---------------------------------	---------	------	--	---	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

4	[SK 3.0] Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas	[IKK 3.2] Persentase satuan PAUD yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	%	0.98	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 0</b> <b>TW3 : 0</b> <b>TW4 : 0.98</b>	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 0</b> <b>TW3 : 0</b> <b>TW4 : 1.79</b>	<p><b>TW1 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Kegiatan yang mendukung IKK ini masih dalam proses persiapan, pelaksanaan sosialisasi, dan penyusunan pedoman pelaksanaan.  <b>Kendala / Permasalahan :</b>  Kendala pada awal tahun adalah sinkronisasi semua program kegiatan yang harus mendukung program prioritas sehingga terdapat penyesuaian program yang mengakibatkan jadwal yang telah ditetapkan mengalami perubahan.  <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Berkoordinasi intens dengan tim peta jalan untuk penyesuaian program kegiatan dengan program prioritas.</p> <p><b>TW2 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Kegiatan yang mendukung IKK ini antara lain: 1. Penyaluran Bantuan Lingkungan Belajar Berkualitas (LBB) ke 200 kabupaten/kota penerima.; dan 2. Penyaluran Bantuan Program Kesiapan Bersekolah ke 50 kabupaten/kota.  <b>Kendala / Permasalahan :</b>  1. Untuk program kesiapan bersekolah harus menunjang sosialisasi Program Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) sehingga kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan tidak hanya bermuatan untuk program kesiapan bersekolah tetapi juga memuat materi tentang IKM.; dan 2. Untuk program LBB, kegiatan bimbingan teknis harus menunjang Program Perencanaan Berbasis Data (PBD) sehingga harus melakukan beberapa penyesuaian untuk memuat materi tentang PBD.  <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Bekerja sama dengan Tim PBD sehingga ada sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan dalam jadwal pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan tahapan Program PBD.</p> <p><b>TW3 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Kegiatan yang mendukung IKK ini antara lain: 1. Penyaluran Bantuan Lingkungan Belajar Berkualitas (LBB) ke 200 kabupaten/kota penerima.; 2. Penyaluran Bantuan Program Kesiapan Bersekolah ke 50 kabupaten/kota.; dan 3 Sosialisasi IKM telah dilaksanakan sebanyak 4 angkatan.  <b>Kendala / Permasalahan :</b>  Harus banyak dilakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan IKM dan penggunaan platform merdeka mengajar (PMM) yang mendukung pelaksanaan IKM di satuan. Mendorong satuan PAUD lainnya (non PSP) untuk mempelajari mengenai IKM ini secara mandiri melalui PMM.  <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Gencar melakukan sosialisasi melalui media sosial PAUDPEDIA dan webinar.</p> <p><b>TW4 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Kegiatan yang mendukung IKK ini antara lain: 1. Penyaluran Bantuan Lingkungan Belajar Berkualitas (LBB) ke 200 kabupaten/kota penerima.; 2. Penyaluran Bantuan Program Kesiapan Bersekolah ke 50 kabupaten/kota.; dan 3 Sosialisasi IKM telah dilaksanakan sebanyak 4 angkatan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong satuan PAUD untuk dapat melaksanakan pembelajaran paradigma baru atau implementasi kurikulum merdeka (IKM). Penghitungan capaian IKK ini didapatkan dari jumlah satuan PAUD penggerak (angkatan 1, 2, dan 3) yang melaksanakan IKM dan telah mendapatkan pendampingan secara intensif, namun untuk satuan satuan PAUD lain yang melaksanakan IKM secara mandiri belum dapat diukur keberhasilan pelaksanaannya sehingga belum dimasukkan dalam penghitungan capaian IKK.  <b>Kendala / Permasalahan :</b>  Harus banyak dilakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan IKM dan penggunaan platform merdeka mengajar (PMM) yang mendukung pelaksanaan IKM di satuan. Mendorong satuan PAUD lainnya (non PSP) untuk mempelajari mengenai IKM ini secara mandiri melalui PMM.  <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Gencar melakukan sosialisasi melalui media sosial PAUDPEDIA dan webinar.</p>
---	---	--	---	------	---	---	---

5	[SK 3.0] Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas	[IKK 3.3] Persentase satuan PAUD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	%	0.98	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 0</b> <b>TW3 : 0</b> <b>TW4 : 0.98</b>	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 0</b> <b>TW3 : 0</b> <b>TW4 : 1.7</b>	<p><b>TW1 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Kegiatan yang mendukung IKK ini masih dalam proses persiapan, pelaksanaan sosialisasi, dan penyusunan pedoman pelaksanaan.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  Kendala pada awal tahun adalah sinkronisasi semua program kegiatan yang harus mendukung program prioritas sehingga terdapat penyesuaian program yang mengakibatkan jadwal yang telah ditetapkan mengalami perubahan.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Berkoordinasi intens dengan tim peta jalan untuk penyesuaian program kegiatan dengan program prioritas.</p> <p><b>TW2 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Kegiatan yang mendukung IKK ini antara lain: 1. Penyaluran Bantuan Peningkatan Peran Bunda PAUD ke 50 lembaga penerima.; 2. Penyaluran Bantuan Literasi Dasar ke 500 satuan PAUD penerima.; 3. Penyaluran Bantuan Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus (ABK) ke 2.000 anak.; 4. Penyaluran Bantuan Pendampingan Mutu ke 139 lembaga penerima.; dan 5. Kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan program untuk 4 (empat) kegiatan telah diselesaikan.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  Tidak ada permasalahan dalam mencapai target triwulan 2.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Melakukan supervisi dan monitoring dalam rangka memastikan pelaksanaan program untuk setiap lembaga penerima bantuan yang telah di-SK-kan.</p> <p><b>TW3 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Kegiatan yang mendukung IKK ini antara lain: 1. Penyaluran Bantuan Peningkatan Peran Bunda PAUD ke 50 lembaga penerima.; 2. Penyaluran Bantuan Literasi Dasar ke 500 satuan PAUD penerima.; 3. Penyaluran Bantuan Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus (ABK) ke 2.000 anak.; 4. Penyaluran Bantuan Pendampingan Mutu ke 139 lembaga penerima.; dan 5. Kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan program untuk 4 (empat) kegiatan telah diselesaikan. Selain itu, untuk peningkatan mutu telah dilakukan sosialisasi, bimtek, maupun pendampingan untuk pelaksanaan program prioritas PBD yang dapat menunjang peningkatan mutu layanan di setiap satuan PAUD.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  Belum semua satuan PAUD mendapatkan informasi mengenai lembar PBD dikarenakan tidak semua kabupaten/kota mendapatkan dana bantuan stimulan untuk melaksanakan PBD di daerahnya.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Melakukan sosialisasi dan pendampingan melalui seri webinar.</p> <p><b>TW4 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Kegiatan yang mendukung IKK ini antara lain: 1. Penyaluran Bantuan Peningkatan Peran Bunda PAUD ke 50 lembaga penerima.; 2. Penyaluran Bantuan Literasi Dasar ke 500 satuan PAUD penerima.; 3. Penyaluran Bantuan Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus (ABK) ke 2.000 anak.; 4. Penyaluran Bantuan Pendampingan Mutu ke 139 lembaga penerima.; dan 5. Kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan program untuk 4 (empat) kegiatan telah diselesaikan. Selain itu, untuk peningkatan mutu telah dilakukan sosialisasi, bimtek, maupun pendampingan untuk pelaksanaan program prioritas PBD yang dapat menunjang peningkatan mutu layanan di setiap satuan PAUD.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  Belum ada sumber data yang pasti untuk melihat peningkatan mutu di satuan PAUD, hal ini dikarenakan rapor mutu pendidikan di PAUD masih dalam proses pengembangan.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Berkoordinasi dengan tim rapor mutu pendidikan untuk dapat memasukkan lembar evaluasi diri sehingga dapat melihat satuan PAUD yang telah meningkatkan mutu melalui lembar perencanaan berbasis data (PBD).</p>
---	---	---	---	------	---	--	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

6	[SK 3.0] Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas	[IKK 3.4] Persentase satuan PAUD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	%	10.21	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 0</b> <b>TW3 : 0</b> <b>TW4 : 10.21</b>	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 0</b> <b>TW3 : 0</b> <b>TW4 : 12.86</b>	<b>TW1 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Kegiatan yang mendukung IKK ini masih dalam proses persiapan, pelaksanaan sosialisasi, dan penyusunan pedoman pelaksanaan. <b>Kendala / Permasalahan :</b> Kendala pada awal tahun adalah sinkronisasi semua program kegiatan yang harus mendukung program prioritas sehingga terdapat penyesuaian program yang mengakibatkan jadwal yang telah ditetapkan mengalami perubahan. <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Berkoordinasi intens dengan tim peta jalan untuk penyesuaian program kegiatan dengan program prioritas.  <b>TW2 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Kegiatan yang mendukung IKK ini adalah pemberian Bantuan Sarana Pembelajaran dengan menyalurkan Bantuan TIK ke 1.263 satuan PAUD penerima dari target 1.294 satuan PAUD. Bantuan TIK ini diberikan dalam bentuk barang melalui e-katalog dan dikhususkan untuk Satuan PAUD Penggerak. Untuk IKK ini, pencapaian dapat dilihat pada akhir tahun dengan melihat data di Dapodik, jumlah satuan PAUD yang memiliki TIK. <b>Kendala / Permasalahan :</b> Jumlah satuan PAUD di Dapodik ada 204.000 sedangkan target jumlah satuan PAUD yang mendapatkan bantuan pemerintah tahun 2022 hanya sebesar 1.294 satuan PAUD atau hanya sekitar 0,63% dari total keseluruhan satuan PAUD. <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Program Prioritas Kemendikbud Ristek hampir semuanya menggunakan aplikasi sehingga menuntut dan mengharuskan satuan PAUD untuk memiliki perangkat TIK agar dapat melaksanakan program yang diluncurkan oleh Kemendikbud Ristek.  <b>TW3 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Bantuan TIK telah disalurkan ke 1.297 satuan PAUD dan telah dilakukan pendampingan penggunaan sarana TIK yang telah disalurkan tersebut. Kegiatan ini mendukung pencapaian IKK ini karena definisi operasional IKK ini adalah melihat jumlah satuan PAUD yang memiliki TIK. <b>Kendala / Permasalahan :</b> Jumlah satuan PAUD di Dapodik ada 204.000 sedangkan target jumlah satuan PAUD yang mendapatkan bantuan pemerintah tahun 2022 hanya sebesar 1.294 satuan PAUD atau hanya sekitar 0,63% dari total keseluruhan satuan PAUD. <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Program Prioritas Kemendikbudristek hampir semuanya menggunakan aplikasi sehingga menuntut dan mengharuskan satuan PAUD untuk memiliki perangkat TIK agar dapat melaksanakan program yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek.  <b>TW4 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Kegiatan yang mendukung capaian IKK ini adalah pemberian bantuan TIK telah disalurkan ke 1.297 satuan PAUD dan telah dilakukan pendampingan penggunaan sarana TIK yang telah disalurkan tersebut. Penghitungan capaian IKK ini adalah jumlah satuan PAUD yang memiliki komputer tahun 2021 (Dapodik, 2021) ditambahkan dengan jumlah satuan PAUD penerima bantuan TIK tahun 2022. <b>Kendala / Permasalahan :</b> Jumlah satuan PAUD di Dapodik ada 204.053 sedangkan target jumlah satuan PAUD yang mendapatkan bantuan pemerintah tahun 2022 hanya sebesar 1.297 satuan PAUD atau hanya sekitar 0,64% dari total keseluruhan satuan PAUD. Sedangkan Program Prioritas Kemendikbudristek hampir semuanya menggunakan aplikasi sehingga menuntut dan mengharuskan satuan PAUD untuk memiliki perangkat TIK agar dapat melaksanakan program yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek. <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Mendorong satuan PAUD untuk memiliki perangkat TIK dengan dana mandiri ataupun memanfaatkan dana BOP PAUD Reguler.
---	---	--	---	-------	--	--	--

7	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	[IKK 4.1] Predikat SAKIP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	Predikat	A	<p><b>TW1</b> : -</p> <p><b>TW2</b> : -</p> <p><b>TW3</b> : -</p> <p><b>TW4</b> : A</p>	<p><b>TW1</b> : -</p> <p><b>TW2</b> : -</p> <p><b>TW3</b> : -</p> <p><b>TW4</b> : A</p>	<p><b>TW1 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Saat ini telah disusun laporan kinerja tahun 2021, PK Direktur Tahun 2022, dokumen RKT dan rencana aksi tahun 2022, POS AP bidang perencanaan, dan masih dalam proses pemenuhan dokumen pendukung lainnya. <b>Kendala / Permasalahan :</b> Penyempurnaan renstra terbit pada akhir bulan Maret 2022 sehingga ada pergeseran dan perubahan jadwal dalam penyusunan dokumen perencanaan pelaksanaan program kegiatan satuan kerja <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Menyelesaikan hal yang bisa diselesaikan terlebih dahulu dan berkoordinasi internal untuk penyusunan jadwal dan target pencapaian per-bulan.</p> <p><b>TW2 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Saat ini telah disusun laporan kinerja tahun 2021, PK Direktur Tahun 2022, dokumen RKT tahun 2023, rencana aksi tahun 2022, dan POS AP bidang perencanaan. Saat ini sedang dalam proses reviu penyempurnaan renstra Direktorat PAUD yang disesuaikan dengan Renstra Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Pemenuhan dokumen pendukung lainnya masih dalam proses penyusunan. <b>Kendala / Permasalahan :</b> Dokumen penyempurnaan renstra Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen diterima pada tanggal 5 Juli 2022 sehingga penyempurnaan renstra Direktorat PAUD masih dalam proses penyusunan/reviu. <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Melakukan koordinasi dengan semua bidang dalam hal penyempurnaan Renstra Direktorat PAUD.</p> <p><b>TW3 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Saat ini telah disusun laporan kinerja tahun 2021, PK Direktur Tahun 2022, dokumen RKT tahun 2023, rencana aksi tahun 2022, dan POS AP bidang perencanaan. Saat ini sedang dalam proses reviu penyempurnaan renstra Direktorat PAUD yang disesuaikan dengan Renstra Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Pemenuhan dokumen pendukung lainnya telah diselesaikan. Telah dilakukan evaluasi mandiri dengan mendapatkan pendampingan dari Biro Perencanaan dan sedang dalam penilaian Inspektorat Jenderal. <b>Kendala / Permasalahan :</b> Tidak ada kendala / permasalahan karena telah dilakukan evaluasi mandiri. <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Mempersiapkan draf laporan kinerja tahun 2022.</p> <p><b>TW4 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Berdasarkan reviu inspektorat II, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2022 memperoleh predikat A dengan nilai 89,25. Saat ini sedang disusun pengukuran kinerja capaian IKK triwulan 4 tahun 2022, perjanjian kinerja akhir/revisi tahun 2022, dan laporan kinerja tahun 2022. <b>Kendala / Permasalahan :</b> Tidak ada kendala / permasalahan karena telah mendapatkan hasil evaluasi berdasarkan reviu inspektorat II. <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Mempersiapkan draf laporan kinerja tahun 2022.</p>
---	---	---	----------	---	---	---	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

7	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai	85	<b>TW1</b> : 0 <b>TW2</b> : 0 <b>TW3</b> : 0 <b>TW4</b> : 85	<b>TW1</b> : 0 <b>TW2</b> : 0 <b>TW3</b> : 0 <b>TW4</b> : 92.23	<b>TW1 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Telah dilakukan revisi DIPA dengan penambahan anggaran BA-BUN pada bulan Maret 2022 dan revisi POK penyesuaian dengan kegiatan yang telah disinkronkan untuk mendukung program prioritas. <b>Kendala / Permasalahan :</b> Masih terdapat beberapa anggaran yang dibintang (diblokir). <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Mempersiapkan semua data dukung untuk pembukaan blokir anggaran.  <b>TW2 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Telah melakukan revisi POK 3 kali untuk penyesuaian kegiatan yang mendukung program prioritas. <b>Kendala / Permasalahan :</b> Masih terdapat beberapa anggaran yang dibintang (diblokir). <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Mempersiapkan semua data dukung untuk pembukaan blokir anggaran.  <b>TW3 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Telah melakukan revisi DIPA untuk memperbaiki rencana penarikan anggaran. <b>Kendala / Permasalahan :</b> Masih terdapat beberapa anggaran yang dibintang (diblokir). <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Mempersiapkan pemotongan untuk blokir anggaran.  <b>TW4 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Semua proses penginputan capaian baik di aplikasi SPASIKITA maupun SAKTI sudah selesai dilaksanakan. <b>Kendala / Permasalahan :</b> Untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran satuan kerja, salah satu faktor pendukung adalah efisiensi, tetapi hal ini sulit dicapai secara maksimal karena apabila efisiensi besar kemungkinan realisasi anggarannya kecil. <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Memaksimalkan realisasi anggaran dengan meningkatkan sasaran output.
---	---	--	-------	----	---	--	--

**Pengukuran Kinerja Rincian Output**

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	<b>Satuan PAUD Mendapatkan pembinaan afirmasi</b>	<b>110.0000</b>	<b>Lembaga</b>	0	59	109	113	<b>Rp. 5.936.746.000</b>
2	[054] Pemberian Bantuan PAUD Afirmasi			0	59	100	100	Rp. 3.203.080.000
3	[055] Sosialisasi Satuan PAUD Aman Bencana			0	1	1	1	Rp. 49.744.000
4	[056] Pemberian Bantuan Tanggap Darurat			0	0	1	5	Rp. 500.000.000
5	[057] Pemberian Bantuan Pasca Bencana			0	0	9	13	Rp. 1.000.000.000
6	[059] Bimbingan Teknis Pelaksanaan Program			0	0	1	1	Rp. 764.321.000
7	[060] Supervisi Monitoring dan Evaluasi			0	0	0	1	Rp. 419.601.000
8	<b>Satuan PAUD Memperoleh Bantuan Sarana Pembelajaran termasuk Alat Permainan Edukatif APE</b>	<b>1294.0000</b>	<b>Paket</b>	0	1263	1297	1297	<b>Rp. 23.441.650.000</b>
9	[054] Pemberian Bimbingan Teknis dan Penyiapan Penyaluran Bantuan			0	0	7	10	Rp. 2.836.963.000
10	[055] Pemberian Bantuan Sarana Pembelajaran PAUD			0	1263	1297	1297	Rp. 20.218.026.000
11	[057] Supervisi Pemberian Bantuan			0	0	0	1	Rp. 386.661.000
12	<b>Satuan PAUD Penggerak yang Mendapatkan Pendampingan</b>	<b>1725.0000</b>	<b>Lembaga</b>	344	2012	2012	2032	<b>Rp. 22.296.653.000</b>
13	[064] Bimbingan Teknis Pelaksanaan Program			3	14	16	20	Rp. 5.457.347.000
14	[065] Pendampingan Satuan PAUD Penggerak			1	3	6	8	Rp. 6.720.193.000
15	[066] Pendampingan Penjaminan Mutu Satuan PAUD			0	139	139	139	Rp. 7.855.687.000
16	[067] Supervisi Monitoring dan Evaluasi			0	0	0	5	Rp. 2.263.426.000
17	<b>Satuan PAUD yang menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran yang berlaku</b>	<b>750.0000</b>	<b>Lembaga</b>	0	750	750	750	<b>Rp. 26.737.175.000</b>
18	[064] Bimbingan Teknis Pelaksanaan Program			0	6	11	13	Rp. 2.710.336.000
19	[065] Pemberian Bantuan Lingkungan PAUD Berkualitas			0	200	200	200	Rp. 9.007.156.000
20	[066] Pemberian Bantuan Program Kesiapan Bersekolah			0	50	50	50	Rp. 4.098.150.000
21	[067] Pemberian Bantuan Literasi Dasar			0	500	500	500	Rp. 7.943.580.000
22	[068] Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum			0	4	4	10	Rp. 1.844.702.000
23	[069] Supervisi Monitoring dan Evaluasi			0	0	0	4	Rp. 1.133.251.000
24	<b>Lembaga Mitra PAUD Memperoleh Pembinaan Peningkatan Kapasitas</b>	<b>200.0000</b>	<b>Lembaga</b>	0	200	200	200	<b>Rp. 26.921.497.000</b>
25	[058] Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Keorangtuaan			0	0	0	1	Rp. 255.892.000
26	[062] Pengelolaan Bantuan			0	0	0	1	Rp. 6.000.000
27	[063] Bimbingan Teknis Pelaksanaan Program			0	3	7	7	Rp. 4.071.076.000
28	[064] Koordinasi Penguatan Peran Lembaga Pemangku Kepentingan			1	1	3	4	Rp. 3.930.889.000
29	[065] Pemberian Bantuan Pokja Bunda PAUD			0	50	50	50	Rp. 3.228.512.000

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

30	[066] Fasilitas Dukungan Pelaksanaan PAUD Berkualitas			3	6	9	12	Rp. 14.523.243.000
31	[067] Supervisi Monitoring dan Evaluasi			0	0	0	2	Rp. 905.885.000
<b>32</b>	<b>Satuan PAUD Menyelenggarakan Pendekatan Holistik Integratif</b>	<b>5000.0000</b>	<b>Lembaga</b>	0	5000	5000	5000	<b>Rp. 21.055.325.000</b>
33	[052] Pengelolaan Bantuan			0	1	1	1	Rp. 187.361.000
34	[058] Bimbingan Teknis Pelaksanaan Program			0	3	10	10	Rp. 2.934.250.000
35	[059] Pemberian Bantuan PAUD HI			0	50	50	50	Rp. 8.467.802.000
36	[060] Pemberian Bantuan Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus			0	1835	2000	2000	Rp. 5.599.252.000
37	[061] Pendampingan Pelaksanaan Program			0	0	4	12	Rp. 2.715.561.000
38	[062] Supervisi Monitoring dan Evaluasi			0	0	0	2	Rp. 1.151.099.000
<b>39</b>	<b>Satuan PAUD yang melaksanakan program UKS</b>	<b>500.0000</b>	<b>Lembaga</b>	0	500	500	500	<b>Rp. 7.770.500.000</b>
40	[053] Bimbingan Teknis Pelaksanaan Program			0	1	4	4	Rp. 806.922.000
41	[054] Pemberian Bantuan UKS PAUD			0	500	500	500	Rp. 6.243.620.000
42	[055] Supervisi Monitoring dan Evaluasi			0	0	1	2	Rp. 719.958.000
<b>43</b>	<b>Layanan Umum</b>	<b>1.0000</b>	<b>Layanan</b>	0.249	0.498	0.747	1	<b>Rp. 2.423.947.000</b>
44	[055] Pelayanan Umum Rumah Tangga dan Perlengkapan			3	6	9	12	Rp. 2.423.947.000
<b>45</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>1.0000</b>	<b>Layanan</b>	0.249	0.498	0.747	2	<b>Rp. 17.103.147.000</b>
46	[001] Gaji dan Tunjangan			3	6	9	12	Rp. 10.920.547.000
47	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor			3	6	9	12	Rp. 6.182.600.000
<b>TOTAL JUMLAH PAGU</b>								<b>Rp. 153.686.640.000</b>

Jakarta, 13 Januari 2023

**Plt. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini,**



**Komalasari**

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU**  
**DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu laporan kinerja DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Januari 2023  
Ketua Tim Reviu



Ishak, S.Sos.  
197008211991031015



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**  
Jalan Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 5 Kompleks Kemdikbud Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5725610 Faksimile (021) 5725610

KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA  
DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : KEP- 0132/C2/KU.02.01/2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
TIM KOORDINASI PELAPORAN KINERJA  
DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaporan kinerja Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini yang berdasarkan pada program dan anggaran, Maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Tim Koordinasi Pelaporan Kinerja Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2022; dan
  - b. Bahwa berdasarkan butir di atas, biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas ini dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2021 dengan Mata Anggaran Keluaran (MAK) 4459.QDB.142.066.I.521119.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  7. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.05/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar; dan
  10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
  11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
- Memperhatikan :
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2022, Nomor: **SP DIPA-023.03.1.690402/2021 tanggal 15 Desember 2021.**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Tim Koordinasi Pelaporan Kinerja Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Pelaporan Kinerja Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2022, adalah:
1. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi penyusunan laporan kinerja;
  2. Menyusun Laporan Kinerja Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini; dan
  3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai laporan kinerja Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas ini dibebankan pada anggaran Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2022 dengan Mata Anggaran Keluaran (MAK) 4459.QDB.142.066.I.521119.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 6 Januari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran  
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini,



Dr. Muhammad Hasbi  
NIP 197306231993031001

Tembusan Yth:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
3. Kepala Biro Keuangan Setjen Kemendikbud;
4. Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III; dan
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini  
Nomor : KEP- 0132/C2/KU.02.01/2022, tanggal 6 Januari 2022  
Tentang : Penunjukan dan Penetapan Tim Koordinasi Pelaporan Kinerja Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2022

No.	Nama	Jabatan Struktural	Tugas
1	Dr. Muhammad Hasbi	Direktur PAUD	Penanggungjawab
2	Drs. Muh. Ngasmawi	Direktorat PAUD	Ketua
3	Nia Nurhasanah, S.Si, M.Pd	Direktorat PAUD	Koordinator I
4	Dra. Widyati Rosita, M.Pd.	Direktorat PAUD	Koordinator II
5	Ina Nurohmah, S.E.	Direktorat PAUD	Koordinator III
6	Jamal	Setditjen PAUD Dikdasmen	Anggota
7	Varian	Setditjen PAUD Dikdasmen	Anggota
8	Irawati Malinda, S.E.	Direktorat PAUD	Anggota
9	Yulianti Yusuf, S.Pd.	Direktorat PAUD	Anggota
10	Dian Septiany Subagio, S.E., M.Pd.	Direktorat PAUD	Anggota
11	Neneng Rachmawati, S.Pd.	Direktorat PAUD	Anggota
12	Roynaldo, S.ST.	Direktorat PAUD	Anggota
13	Robbayanti Ratna Ningrum, S.Kom.	Direktorat PAUD	Anggota
14	Aris Ciptaningtyas K, S.Pd.	Direktorat PAUD	Anggota
15	Nugrahaini	Direktorat PAUD	Anggota

Kuasa Pengguna Anggaran  
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini,

Dr. Muhammad Hasbi  
NIP 197306231993031001



**CATATAN:**

